

338.642

Sum

f a

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BORDIR DI KABUPATEN KUDUS

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat S-2

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**



Diajukan oleh :

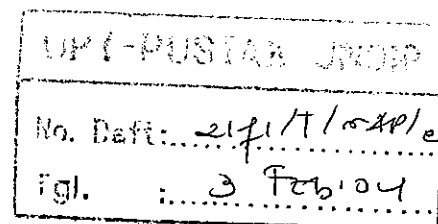
SUMIDI

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BORDIR DI KABUPATEN KUDUS



Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : SUMIDI
NIM : D4E002080

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji :
Pada tanggal : 20 September 2003

Susunan Tim Penguji :

Ketua Penguji/Pembimbing I

Drs. SUNDARSO, SU

Anggota Dewan Penguji :

1. Dra. ENDANG LARASATI, MS

Sekretaris Penguji/Pembimbing II

Drs. HARDI WARSONO, MTP

2. Drs. FATHUR ROCHMAN, M.Si

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu Persyaratan
Untuk memperoleh Magister Sain

Tanggal : September 2003



Ketua Program STUDI MAP
Universitas Diponegoro Semarang

Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, Ph.D

RINGKASAN

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (i). bagaimana pola pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan pembinaan sumber daya manusia, masalah bahan baku dan keterbatasan teknologi pada industri kecil bordir di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Disperindag dan (ii) bagaimana pola pendampingan yang tepat yang harus diberikan pemerintah kepada pengusaha industri kecil bordir di kabupaten Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. pola pemasaran yang ada meliputi : (i) dijual ke konsumen, (ii) melalui pengecer, (iii) berdasarkan pesanan dan (iv) melalui pihak ketiga untuk dikirim ke daerah pemasaran yang jauh / luar negeri dan (v). titip barang. Hal ini menunjukkan bahwa akses pasar belum sepenuhnya dikuasai dengan baik. 2. Keuangan : separo dari responden menggunakan modal pihak lain untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut menunjukkan masih sangat dibutuhkannya bantuan permodalan. Kendala yang ada, kredit masih sulit dijangkau perajin kecil. 3. Sumberdaya Manusia : pada umumnya tingkat ketrampilan dirasakan cukup memadai. Namun kendala yang masih dirasakan adalah terbatasnya inovasi desain. 4. Bahan baku : bahan baku diperoleh dari lokasi setempat dan pada umumnya tidak memperoleh kesulitan. 5. Teknologi : pada umumnya menggunakan mesin manual dan mesin bordir juki. Perkembangan teknologi bordir terakhir menuju pada komputerisasi. Sampai saat ini yang dirasakan belum tercukupinya sarana/ peralatan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Implikasi lebih lanjut dari temuan ini adalah : 1 Memperkuat akses pasar dengan informasi dan fasilitasi pameran. 2. Diperlukanya sistem perkreditan yang fleksibel sesuai dengan masa-masa produksi. 3. Mengadakan pelatihan desain produk untuk menumbuhkan inovasi. 4. Diperlukan peningkatan penguasaan teknologi secara umum meliputi penggunaan teknologi dalam berbagai aspek manajemen (peralatan, pemasaran dsb).

ABSTRAKSI

Sumidi , 2003, Pemberdayaan Industri Kecil Bordir Di Kabupaten Kudus

Kata kunci : Kemandirian, Fasilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : pola pemasaran, kondisi finansial, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, pengadaan bahan baku serta penggunaan teknologi pada industri kecil bordir Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey yang diperkaya dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik *in-depth interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sederhannya pola-pola pengembangan industri kecil yang ada . Keterbatasan itu terlihat pada pola pemasaran yang masih mengandalkan pihak ketiga, keterbatasan modal yang menghambat pengembangan , terbatasnya daya inovasi, masih terbatasnya teknologi yang mengakibatkan terbatasnya volume produksi. Hanya aspek skill atau ketrampilan dan bahan baku yang relatif tidak mengalami kendala. Temuan tersebut berkonsekuensi pada masih diperlukannya dampingan atau fasilitasi dari pemerintah untuk memperkuat kemandirian.

ABSTRACT

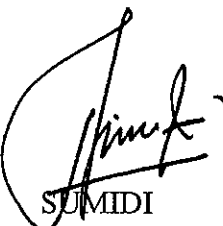
The Empowerment of Embroidery Small Scale Industry in Kudus Regency. Masters of Public Administration. Diponegoro University, 2003.

This research is aimed at describing : marketing patterns, financial condition, manpower quantity and quality, raw material availability, and technology at embroidery small scale industry in Kudus Regency. This research was done using survey method, enriched with qualitative analysis using in-depth interview. Research findings show that this industry is still using simple development patterns, proved by : marketing relies on third party, limited capital which hampers development efforts, limited innovation capability, and limited technology causing limited production volume. However, this research finds that skill and raw material availability are satisfactory. Therefore, it is recommended that facilitation or guidance from teh government is still needed in order to empower this industry.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 September 2003



SUMIDI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulisan tesis dengan judul : **“PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL BORDIR DI KABUPATEN KUDUS”** dapat diselesaikan.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil fokus penelitian mengenai industri kecil bordir. Hal tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan dan pertumbuhan industri kecil bordir di Kabupaten Kudus yang kurang begitu pesat.

Selanjutnya dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha/pengrajin, pemerintah dapat memberikan pola pendampingan yang tepat kepada para pengusaha industri kecil bordir di Kabupaten Kudus.

Dari gambaran pemikiran diatas penulis telah menuangkan ke dalam karya ilmiah berupa tesis sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh derajat gelar Sarjana Strata Dua (S2), Program Studi Magister Ilmu Administrasi dengan Konsentrasi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, arahan, bantuan serta saran, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dan secara khusus diarturkan kepada yang terhormat :

penulis mengikuti pendidikan.

10. Istri dan anak-anakku yang telah memberikan semangat dan dorongan serta do'a selama Publik Universitas Diponegoro Semarang.
9. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan VII pada Program Studi Magister Administrasi Perdagangan Propinsi Jawa Tengah.
8. Drs. Abdul Sulhadi, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Propinsi Jawa Tengah.
7. Ir. Muhammad Saleh, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Semarang.
6. Segenap Dosen Pengajar Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro
5. Dra. Endang Larasati, MS dan Drs. Fathur Rochman, M.Si selaku Dewan Penguji.
4. Drs. Sundarso, SU dan Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Pembimbing I dan II.
- Universitas Diponegoro Semarang.
3. Drs. Ali Mufiz, MPA selaku Sekretaris Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik
1. Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tesis ini pastilah tidak terlepas dari adanya kekurangan dan kelemahan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk lebih menyempurnakan materi dan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dengan penuh kerendahan hati penulis masih mengharapkan adanya berbagai masukan berupa saran maupun pemikiran konstruktif yang akan sangat berguna untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dan bermanfaat bagi yang berkepentingan, minimal dapat digunakan sebagai tambahan bacaan.

Semarang, September 2003

SUMIDI

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Ringkasan	iii
Abstraksi	iv
Surat Pernyataan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xvii

Bab I :Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8

Bab II : Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori	9
I. Industri Kecil	9
1. Pengertian Industri Kecil	9
2. Masalah Utama Pengembangan Industri Kecil	10
II. Pemberdayaan Industri Kecil	24
1. Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	24
2. Pendampingan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat	33

Bab III : Metode Penelitian

A. Rancangan Penelitian	41
B. Variabel Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Instrumen Penelitian	47
F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	47
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Teknik Analisa Data	49

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Keadaan Geografis	50

2. Penduduk dan Tenaga Kerja	51
3. Kondisi Sektor Industri	56
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	59
B. Hasil Penelitian	64
1. Identitas Responden dan Informan	64
2. Analisis Variabel Pengembangan Industri Kecil Bordir Kudus.....	72
3. Analisis Kebutuhan Dampingan Industri Kecil Bordir Kudus	98
C. Diskusi	114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

Daftar Pustaka	120
-----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar	II.1	: Faktor-Faktor Luar	13
	II.2	: Skema Pendekatan Masalah	23
	II.3	: Persyaratan Kelayakan Program	25
	II.4	: Pendekatan Pemberdayaan Dalam Pengembangan Industri Kecil	40
	IV.1	: Kelayakan Program Pendampingan	114
Halaman			

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Perkembangan Industri Kecil Bordir di Kabupaten Kudus Tahun 2000 hingga 2002	3
III.1 : Variabel Dimensi dan Indikator Penelitian	44
III.2 : Populasi dan Sampel	47
IV.1 : Luas Wilayah dan Prosentase Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus	51
IV.2 : Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2002	55
IV.3 : Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan di Kabupaten Kudus	56
IV.4 : Data Perkembangan Industri Tahun 2000 s/d 2002 di Kabupaten Kudus	57
IV.5 : Banyaknya Industri Kecil/Menengah di Kabupaten Kudus Tahun 2001 – 2002	58
IV.6 : Data Perkembangan Industri Kecil Bordir Tahun 2000 s/d 2002 Di Kabupaten Kudus	59
IV.7 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Tahun 1997 – 2001	62

IV.8	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993	Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Tahun 1997 –	63
IV.9	: Daftar Responden dan Identitasnya		65
IV.10	: Umur Usaha		66
IV.11	: Omset Per Bulan		66
IV.12	: Saluran Distribusi		72
IV.13	: Daerah Pemasaran Terjauh		73
IV.14	: Daerah Pemasaran Terbanyak		73
IV.15	: Pola Pemasaran		74
IV.16	: Asal Ide Desain		75
IV.17	: Media Promosi		76
IV.18	: Merk Dagang		76
IV.19	: Kemasan		77
IV.20	: Keindahan Kemasan		78
IV.21	: Besar Modal Awal		79
IV.22	: Modal Diri Sendiri		80
IV.23	: Modal Pinjaman		81
IV.24	: Tambahan Modal		82
IV.25	: Modal Untuk Investasi		83
IV.26	: Kemudahan Akses Terhadap Sumber Modal		84
IV.27	: Ketercukupan Pegawai		85

IV.28	: Kualitas Pegawai	86
IV.29	: Ketrampilan Pegawai	87
IV.30	: Perencanaan Kebutuhan Pegawai	88
IV.31	: Kejelasan Pembagian Pekerjaan	89
IV.32	: Penghargaan Khusus	90
IV.33	: Pelatihan Kemampuan	90
IV.34	: Kemudahan Mendapat Bahan Baku	91
IV.35	: Keterjangkauan Harga Bahan Baku	92
IV.36	: Kualitas Bahan Baku	93
IV.37	: Sistem Pengadaan Bahan Baku	94
IV.38	: Jumlah Peralatan	95
IV.39	: Kememadaian Peralatan	96
IV.40	: Penguasaan Alat Baru	97
IV.41	: Pengadaan Alat Baru	98
IV.42	: Pola dan Identifikasi Kebutuhan Dampingan	112

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan.
2. Peta Kabupaten Kudus.
3. Hasil Penelitian Kuantitatif.
4. Hasil Penelitian Kualitatif.
5. Dokumentasi.

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan industri bagi suatu daerah sangatlah penting, selain sebagai aset daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, juga menanggulangi timbulnya masalah sosial yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dan kerawanan sosial. Efek positif berantai yang diharapkan dari suatu kegiatan usaha bordir jelas nampak pada serapan tenaga kerja yang dilibatkannya.

Pengertian industri sebenarnya sangatlah luas cakupannya, yakni mulai pengolahan bahan mentah sampai barang jadi. Pemerintah memberikan pengertian industri sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984).

Kudus merupakan salah satu kabupaten yang menonjol dalam industri kecil yang memiliki nilai komparatif dan kompetitif tinggi. Salah satu jenis industri kecil potensial yang terdapat di Kabupaten Kudus adalah Industri Bordir. Selain keunikannya, bordir kudus telah mempunyai “nama” yang cukup dikenal. Jenis industri bordir, bila diamati berdasarkan jumlah modal usaha tergolong industri kecil. Namun demikian, keberadaannya sangat penting dan senantiasa mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah, karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mengingat pembangunan perekonomian (industri kecil) berorientasi pada masyarakat banyak (padat karya) maka pihak pemerintah Kabupaten Kudus,

berupaya untuk memberdayakan pengusaha kecil bordir baik secara intensifikasi (meningkatkan kualitas) maupun ekstensifikasi (memperbanyak jumlah pengusaha bordir). Oleh sebab itu, identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh sektor perekonomian pengusaha bordir tersebut harus dilakukan, untuk kemudian dicari alternatif terbaik untuk penanganannya (Swasono, 1998).

Industri kecil bordir yang terdapat di Kabupaten Kudus, meskipun sudah lama memperoleh perhatian, dukungan dari pihak pemerintah daerah namun demikian hasilnya belum mengembangkan atau belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan terutama hasil wawancara dengan pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kudus serta instansi terkait yang menangani industri kecil bordir menyatakan :

“... meskipun ada kemajuan, namun perkembangannya lambat”.

Pernyataan pejabat tersebut sangat terlihat bila dikaitkan dengan data penambahan unit usaha, tenaga kerja, serta nilai investasi dan produksi sejak tahun 2000 hingga 2002, sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL I.1
PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL BORDIR DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2000 HINGGA 2002

No	Uraian	Tahun 2000	Tahun 2001	%	Tahun 2002	%
1.	Unit Usaha	237	239	0,84	243	2,53
2.	Tenaga Kerja	3.176	3.198	0,69	3.329	4,82
3.	Nilai Investasi (000)	7.820.203,66	9.866.623,94	26,17	11.586.769,88	48,16
4.	Nilai Produksi (000)	46.666.306,66	64.802.049,39	38,86	80.917.047,73	73,40

Sumber data : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus, tahun 2002

Tabel di atas memperlihatkan lambannya perkembangan industri kecil bordir di Kudus pada kurun waktu 3 tahun terakhir :

- a. Pertambahan unit kerja hanya sebanyak 6 unit,
- b. Pertmbahan serapan tenaga kerja hanya 153 orang,
- c. Nilai investasi bertambah Rp 3.766.566,22
- d. Nilai produksi bertambah 34.250.741 unit.

Banyak faktor yang menyebabkan kenapa pemberdayaan yang dilakukan oleh Kantor Perindag untuk memperdayakan industri kecil bordir yang ada di Kabupaten Kudus belum berhasil. Secara umum, kurangberhasilan masih nampak dari segi penambahan jumlah pengusaha, tenaga kerja, penambahan modal kerja/nilai investasi dan nilai produksi tergolong lamban. Di lain pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus bersama Dinas Perindag Propinsi telah memberikan bantuan modal usaha, bimbingan teknis produksi, bimbingan dan pembinaan dalam ekspansi pemasaran hasil dan fasilitasi lainnya.

Fenomena lain yang menunjukkan lemahnya perkembangan industri kecil

bordir di Kabupaten Kudus menurut penurunan pengusaha bordir, diantaranya:

- Disain bordir kurang bervariasi,
- Terbatasnya pangsa pasar (relatif masih bersifat lokal dan regional),
- Penggunaan teknologi produksi yang relatif tidak berubah, dan
- Sedikitnya pengembangan teknologi industri tepat guna oleh para pengusaha.

Sementara itu menurut laporan Dinas Perindag Kudus (2002),

karakteristik industri kecil hampir seragam antara lain sebagai berikut :

- a) Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara administrasi dan produksi.
- b) Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga perbankan.
- c) Lemahnya struktur permodalan.
- d) Lemahnya manajemen usaha dan belum meratanya tingkat ketrampilan pengrajin.
- e) Keterbatasan informasi pasar.
- f) Rendahnya mutu produksi.
- g) Peralatan masih sederhana.

Hambatan pengembangan industri kecil bersifat multidimensional. Hambatan tersebut secara pokok terkategori dalam hambatan internal perusahaan dan hambatan eksternal perusahaan. Hambatan internal bersumber dari dalam perusahaan. Sementara hambatan eksternal bersumber di luar perusahaan atau di luar pengaruh pengusaha. Ada kesamaan antara hambatan yang diidentifikasi oleh teoritisi, pelaku usaha dengan Dinas Perindag Kabupaten Kudus meski dengan penyebutan, pengelompokan dan urutan yang berbeda. Secara teoris masalah-masalah utama usaha kecil, termasuk bordir meliputi: pemasaran, finansial, SDM,

bahan baku dan teknologi (Tambunan, 2002). Ternyata tidak terdapat pertentangan antara identifikasi masalah antara praktisi usaha dengan pakar. Sementara itu, ditemui pula kelemahan intervensi pemerintah yakni : ketidak sesuaian antara kebutuhan pengusaha bordir dengan model bantuan/bimbingan yang diberikan Depperindag dan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait, rendahnya etos kerja, keterbatasan pengetahuan terhadap pangsa pasar domestik maupun internasional, dan yang lainnya.

Setiap pengusaha/industri kecil bordir dan daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha/industri kecil bordir tidak dapat dilakukan secara generalisasi. Cara penanganan (terapi) masalah yang digunakan oleh pihak pemerintah juga tidak berlaku general kepada semua pengusaha/industri kecil bordir di berbagai daerah, bahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha bordir di Kabupaten Kudus bervariasi (berbeda-beda), sehingga menuntut penanganan yang berbeda pula.

Kurangnya akurasi pihak Disperindag dan instansi pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha bordir yang kurang cermat dan penggunaan terapi yang berlaku secara general, menjadi salah satu penyebab lambannya perkembangan industri kecil bordir yang ada di Kabupaten Kudus. Agar mampu untuk mengembangkan potensi industri kecil dan menengah, maka harus dipahami masalah-masalah yang dihadapi oleh industri kecil serta mampu menciptakan strategi yang tepat guna pemberdayaan dan pengembangan industri kecil.

Uraian di atas pada intinya berfokus pada 5 kendala pengembangan

industri kecil bordir, yakni :

1). pemasaran

2). finansial

3). SDM

4). Bahan baku, dan

5). Teknologi.

Sementara juga ditemui kekurangan antara kebutuhan pengusaha dengan pola pendampingan (dulu disebut pembinaan) yang diberikan oleh lembaga terkait.

Dengan uraian di atas, penelitian ini akan menitik beratkan pada analisis

faktor-faktor pengembangan industri kecil bordir (pemasaran, finansial, SDM,

bahan baku dan teknologi) dan kaitannya dengan model pendampingan yang

diharapkan oleh pelaku usahanya.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- 1) Pangsa pasar relatif masih bersifat lokal dan regional dan keterbatasan informasi pasar.
- 2) Terbatasnya modal, baik modal kerja maupun modal investasi serta Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga perbankan.
- 3) Terbatasnya sumber daya manusia, termasuk rendahnya kualitas pengrajin yang nampak pada disain bordir kurang bervariasi serta tidak ada pembagian tugas yang jelas antara administrasi dan produksi.

- 4) Bahan baku : masih dijumpai hambatan mencari bahan baku yang berkualitas termasuk kain dan benang.
- 5) Teknologi : penggunaan teknologi produksi yang relatif tidak berubah, dan sedikitnya pengembangan teknologi industri tepat guna oleh para pengusaha.

2. Perumusan Masalah

Menurut Sugiono (1998:197), penelitian berangkat dari adanya permasalahan yaitu merupakan penyimpangan atau deviasi sesuatu yang standar, atau masalah adalah kesenjangan antara sebenarnya dan kenyataan. Sebaiknya perumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya. Dalam penelitian ini masalah diartikan sebagai kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Lambatnya perkembangan industri kecil bordir di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal, maka penelitian deskriptif analitis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pola pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan pembinaan sumber daya manusia, masalah bahan baku dan keterbatasan teknologi pada industri kecil bordir di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Disperindag ?
2. Bagaimana pola pendampingan yang tepat dikaitkan dengan faktor-faktor pemberdayaan industri kecil pada industri bordir Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mendeskripsikan pola pemasaran, kondisi finansial, kuantitas dan kualitas sumbu daya manusia, kemudahan bahan baku serta penggunaan teknologi industri kecil bordir Kudus.
- (2) Untuk mengetahui kebutuhan dampingan pada ke 5 aspek di atas sebagai masukan penyusunan pola pembinaan yang tepat oleh dinas Pemerintah dalam pengembangan industri kecil bordir Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah khususnya bidang pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan efektivitas kerja dan kinerja pemerintah. Kontribusi ini dapat menawarkan konsep pembangunan yang berdimensi kerakyatan, pembangunan yang berorientasi pada manusia, pembangunan berkelanjutan dan lebih mengutamakan pembangunan ekonomi rakyat kecil serta pembangunan pola dan kosep pemberdayaan masyarakat.
- b. Secara praktis, menjadi masukan bagi Penda Kabupaten Kudus dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan kegiatan untuk mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil terutama bordir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

I. Industri Kecil

1. Pengertian Industri Kecil

Banyak pengertian atau definisi tentang industri kecil. Pengertian industri kecil beserta kriterianya sangat beragam. Keragaman ini lebih disebabkan oleh pendefinisian pihak-pihak atau lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan pengembangan industri kecil.

Pengertian industri kecil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah “kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya”. Namun demikian ada beberapa definisi Usaha Kecil lain, misalnya :

- a. UU No.9 /1999 menetapkan bahwa Usaha Kecil adalah : unit usaha yang memiliki nilai aset neto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp 200 juta, atau penjualan per tahun tidak lebih besar dari Rp 1 miliar.
- b. Inpres No 10 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Usaha Menengah adalah suatu unit usaha dengan nilai aset neto (di luar tanah dan gedung) antara Rp 200 juta hingga Rp 10 miliar; di atas itu adalah Usaha Besar.

Dalam praktiknya, antar departemen dan badan pemerintah punya

kriteria sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan UKM (Tambunan, 2002). Perbedaan tersebut terlihat misalnya pada Depperindag dan BPS. Depperindag mengukur Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan nilai investasi awal (aset), sedangkan BPS berdasarkan jumlah pekerja.

BPS (1998) membedakan antara industri kecil (IK), industri rumah tangga (IRT) dan industri menengah besar (IMB). IK adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha, sedangkan IRT adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling banyak 4 orang termasuk pengusaha. Dengan demikian, usaha tanpa pekerja (self employment unit) termasuk kategori ini. Sementara itu, IMB adalah unit usaha yang memperkerjakan lebih dari 20 orang.

2. Masalah Utama Pengembangan Industri Kecil

Pembudayaan pengusaha industri kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Dalam kenyataan di lapangan banyak dijumpai kendala dalam rangka pembudayaan pengusaha industri kecil, seperti tingkat kemampuan managerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha industri kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Upaya menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat selalu dilaksanakan oleh pemerintah yang memang berkewajiban membangun perekonomian masyarakat. Keberpihakan kebijakan pemerintah atas

perekonomian kecil (rakyat) dapat dilihat pada masa pemerintahan transisi presiden Habibie, dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, khususnya pasal 5 berbunyi :

Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Pembangunan dibidang industri kecil yang lebih mengutamakan pemerataan kesempatan kerja perlu untuk lebih ditingkatkan melalui pemberdayaan dan penyempurnaan pengaturan serta pengembangan usaha pengusaha kecil. Industri kecil merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Harus diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui kebijakan pengembangan industri kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang *concern* dengan pengembangan industri kecil. Hanya saja upaya pembinaan usaha kecil yang sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri (Kuncoro, 1997).

Karakteristik umum industri kecil hampir seragam antara lain :

- a) Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara administrasi dan produksi.
- b) Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga perbankan.

- c) Lemahnya struktur modalan.
- d) Lemahnya sumberdaya manusia, termasuk rendahnya kualitas manajemen usaha dan kualitas pengrajin yang nampak pada disain bordir kurang bervariasi serta tidak ada pembagian tugas yang jelas antara administrasi

dan produksi.

- e) Keterbatasan informasi pasar.
- f) Rendahnya mutu produksi.
- g) Peralatan masih sederhana.

Permasalahan pengembangan industri kecil sangatlah beragam. Keragaman masalah ini bukan saja ditemui pada perbedaan produk, tetapi juga terkait lokasi, antar sentra, antar sektor atau sub sektor, atau pula antar unit usaha dalam kegiatan / sektor yang sama. Namun demikian, permasalahan umum secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan sumbernya, yakni masalah internal (berasal dari dalam perusahaan sendiri) dan masalah eksternal (berasal dari luar atau di luar pengaruh pengusaha).

1). Masalah eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan industri kecil menurut Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Jawa Tengah Tahun 2001, meliputi :

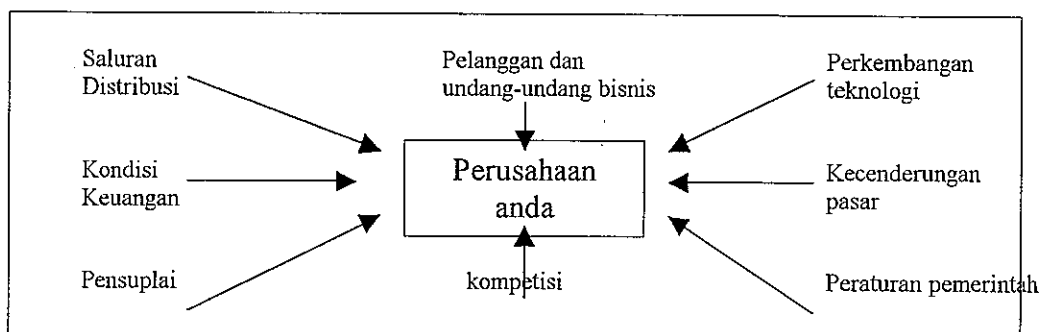
- (1) Perundang-undangan
- (2) Peraturan daerah
- (3) Kondisi perekonomian

- (4). Kondisi sarana prasarana
- (5). Kondisi sosial budaya
- (6). Kondisi politik
- (7). Kondisi keamanan.

Terkait masalah eksternal, Meredith (2002) menyebutkan sebagai sesuatu yang mungkin tidak dapat dikendalikan, namun pasti akan mempengaruhi strategi perencanaan usaha. Pengusaha mungkin tidak dapat menghindari pengaruhnya, tetapi dapat mengurangi dampaknya, bila dapat bertindak gesit dan efektif. Faktor-faktor luar dimaksud adalah :

- (1) Saluran distribusi.
- (2) Kondisi keuangan.
- (3) Pemasok.
- (4) Kompetisi.
- (5) Peraturan pemerintah.
- (6) Kecenderungan pasar.
- (7) Perkembangan teknologi.
- (8) Pelanggan dan Undang-undang bisnis

Secara skematis Meredith menggambarkan sebagai berikut :



Gb. II.1. Faktor-faktor luar

Sumber : Meredith, Geoffrey G., (2002), *Kewirausahaan Teori dan Praktek*.

2). Kondisi internal

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Jawa Tengah Tahun 2001 mengidentifikasi faktor-faktor internal pengembangan industri kecil, meliputi :

- 1). Kewirausahaan.
- 2). Pemasaran.
- 3). Produksi / teknologi.
- 4). Keuangan.
- 5). Modal usaha.
- 6). Bahan baku.
- 7). Tenaga kerja.

Sementara itu, Tulus T.H. Tambunan (2002) telah mengidentifikasi beberapa kendala utama pengembangan industri kecil secara internal, yakni meliputi : modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan bahan baku, keterbatasan teknologi, SDM terutama manajemen dan teknisi, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Untuk selanjutnya Tambunan membahas permasalahan industri kecil ini dengan urutan sebagai berikut :

- 1). Kesulitan pemasaran.
- 2). Keterbatasan finansial.
- 3). Keterbatasan SDM.
- 4). Masalah bahan baku.
- 5). Keterbatasan teknologi.

Untuk mencari indikator dari setiap faktor pengembangan industri kecil tersebut berikut diuraikan berbagai hal tentang faktor-faktor pengembangan industri kecil di atas.

1). Kondisi Pemasaran

Pemberdayaan industri kecil dalam bentuk pemasaran dimaksudkan untuk mendorong dan mendukung kegiatan pengembangan produk industri pasar ekspor, pasar regional dan pasar lokal, dengan demikian dapat membantu para pengusaha industri dalam kelangsungan usahanya.

James dan Akrasanee (dalam Tambunan, 2002) melakukan studi lintas negara ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa salah satu aspek yang terkait pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pada pasar domestik dari produk serupa maupun pasar-pasar yang lebih tinggi. Kaitan daya saing pasar adalah kehandalan produksi dalam mempertahankan volume produksi maupun kualitas produksi. Kaitan lain dari hambatan pemasaran adalah kurangnya informasi tentang peluang pasar, termasuk standard-standard produk dan perdagangan. Sampai saat ini praktis semua perusahaan di Indonesia yang pernah mendapat sertifikat ISO dan sejenisnya umumnya dari kalangan Usaha Besar.

Salah satu faktor produksi yang penting dalam usaha bordir adalah keberadaan *show room* pada sentra industri kecil bordir. Dengan *show room* tersebut para pelaku dengan mudah memilih barang atau

melakukan transaksi jual beli lebih baik lagi jika ditempat untuk memproduksi juga dilengkapi dengan show room. Sebab jika ada pembeli yang kurang puas dengan produk yang sudah ada dapat memesan produk yang diinginkan.

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Jawa Tengah (Perindag Jateng dan Lemlit UNDIP, 2000) menyusun indikator pemasaran meliputi :

- a. Pengetahuan tentang pasar
- b. Intensitas promosi
- c. Pencantuman merk dagang
- d. *Packing* (kemasan)

2). Keterbatasan Finansial

Pada industri kecil bordir Kabupaten Kudus, faktor modal mempunyai peranan penting dalam kegiatan produksi. Pengertian modal dalam ekonomi terdiri dari modal yang habis dalam sekali pakai. Modal ini digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari dan biaya dalam bentuk uang baik kas maupun membeli bahan, membayar tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan modal tetap adalah modal/aktiva yang tidak habis dalam sekali pakai, melainkan secara berangsur habis turut serta dalam proses produksi selama periode tertentu.

Kendala utama yang banyak dialami oleh pengusaha industri kecil termasuk industri bordir adalah permodalan. Dengan kondisi modal yang

sangat terbatas yang dimiliki oleh pengusaha bordir mereka mengalami hambatan dalam pengembangan usaha. Hambatan modal tersebut diperberat dengan kesulitan mereka untuk mengakses tambahan modal dengan mengajukan kredit ke bank karena tidak adanya legalitas usaha dan tidak adanya agunan atau jaminan serta tidak adanya lembaga penjamin. Untuk mengeliminasi kendala modal ini Pemerintah Kabupaten Kudus telah menawarkan bantuan modal melalui APBD setiap tahun.

Tambahan mengemukakan dewasa ini usaha kecil Indonesia menghadapi 2 aspek utama keuangan, yakni (1) mobilisasi modal awal (*star up capital*) dan akses ke modal kerja, (2). Finansial jangka panjang untuk investasi untuk pertumbuhan jangka panjang.

Meski umumnya modal awal berasal dari modal (tabungan) sendiri atau sumber modal informal, namun sumber ini umumnya tidak mencukupi untuk kegiatan produksi apalagi untuk investasi. Sementara modal dari perbankan masih belum dapat diandalkan usaha kecil. Oleh karena itu, meski sudah cukup banyak modal-modal pinjaman atau skim kredit dari perbankan atau BUMN, pendanaan dari sumber informal masih dominan dalam pembiayaan.

Kesulitan yang dihadapi usaha kecil dalam pemanfaatan modal perbankan antara lain (survei BPS 1998) ; selain memang tidak bermat pinjam uang bank juga karena ketiadaan agunan. Alasan lainnya, karena tidak tahu prosedur perbankan, atau prosedur terlalu sulit dan makan waktu serta bunga bank yang relatif tinggi.

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Jawa Tengah (Perindag Jateng dan Lemlit UNDIP, 2000) menyusun indikator keuangan meliputi :

- a. Jumlah modal usaha.
- b. Struktur modal (kekayaan sendiri, pinjaman).
- c. Pemanfaatan kredit.
- d. Pembayaran pajak

3). Keterbatasan SDM

Kondisi utama dalam SDM di industri kecil dan industri rumah tangga adalah dalam aspek-aspek :

- a. *Entrepreneurship*,
- b. Manajemen.
- c. Teknik produksi.
- d. Pengembangan produk.
- e. *Engineering design*.
- f. *Quality controll*.
- g. Organisasi bisnis.
- h. Akuntansi.
- i. *Data processing*.
- j. Teknik pemasaran, dan
- k. Penelitian pasar.

Keahlian-keahlian dalam setiap aspek tersebut sangat diperlukan untuk memperluas dan mempertahankan kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, perluasan pangsa pasar dan menembus pasar baru.

Pada umumnya diyakini pelatihan dapat memanfaatkan masalah ini. Namun biaya pelatihan akan terasa berat bila diselenggarakan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk menyelenggarakan program-program pelatihan bagi pengusaha dan tenaga kerja usaha kecil. Namun demikian efektivitas pelatihan yang pernah diberikan seringkali diragukan. Hal tersebut karena :

- Pelatihan seringkali terlalu teoritis,
- Waktu terlalu singkat,
- Tidak ada tindak lanjut (mis, beberapa saat setelah latihan usai, pemberi latihan mengunjungi kembali pengusaha untuk mengetahui sejauhmana pelatihan dapat diterapkan dalam usahanya),

- Seringkali tidak cocok dengan kebutuhan mereka sebenarnya.

Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Jawa Tengah (Perindag Jateng dan Lemlit UNDP, 2000) menyusun indikator SDM meliputi :

- a. Perencanaan tenaga kerja .
- b. Pembagian kerja.
- c. Pemberian *reward*
- d. Pelatihan dan pengembangan SDM

- e. Jumlah dan ketercukupan tenaga kerja
- f. Kualitas tenaga kerja

4). Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku seringkali menjadi kendala serius dalam industri kecil. Kendala ini menjadi terasa jauh lebih berat selama masa krisis. Harga bahan baku menjadi tak terjangkau selain menjadi langka. Tidak sedikit unit-unit industri kecil kemudian mati atau beralih profesi karena kelangkaan dan ketidakterjangkauan harga bahan baku ini. Catatan selama tahun 1998 sampai 2000 memperlihatkan : pengusaha rokok kretek di Jawa Tengah dan Batik Pekalongan menghentikan produksinya karena mahalnnya harga bahan baku. Indikator bahan baku ini meliputi :

- a. Kemudahan memperoleh bahan baku (darimana diperoleh bahan baku)
- b. Keterjangkauan harga bahan baku
- c. Kualitas bahan baku
- d. Sistem pengadaan bahan baku (rutin, sesuai pesanan, kalau ada produksi)

5). Keterbatasan Teknologi.

Pada umumnya UKM di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional atau mesin-mesin produksi manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak saja berakibat total factor productivity dan efisiensi dalam produksi, tetapi juga menjadikan rendahnya kualitas produk.

Penyebab keterbatasan teknologi oleh Tambunan diidentifikasi antara

lain karena :

- a. Keterbatasan dana investasi mesin produksi.
- b. Keterbatasan informasi tentang perkembangan teknologi mesin produksi baru,
- c. Keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru dan berinovasi dalam produk maupun proses produksi.

Rendahnya pemilikan atau penguasaan teknologi ini juga merupakan ancaman IK dalam persaingan bebas.

Program peningkatan kemampuan teknologi, pemberdayaan teknologi dan produksi dimaksudkan untuk mendorong agar pengusaha industri kecil mempunyai kemampuan dibidang teknologi serta lebih mampu dalam peningkatan atau penciptaan nilai tambah sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mewujudkan produktivitas serta efisiensi dan mempunyai daya saing yang tinggi.

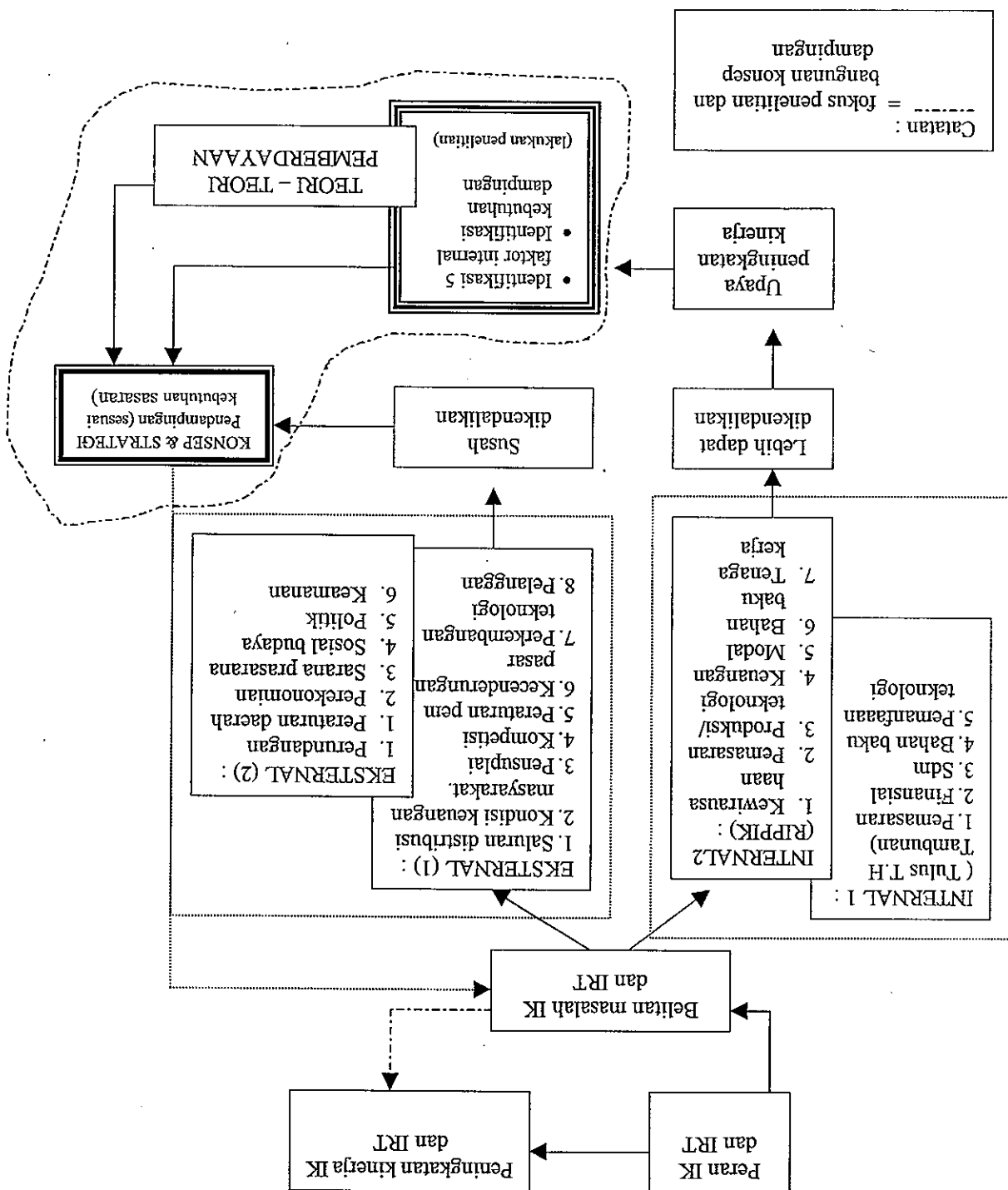
Pada pemilik *show room* ini yang langsung berhadapan dengan konsumen, dari pilihan-pilihan konsumen ini, para pemilik *show room* mengetahui produk apa yang sedang digemari masyarakat dan produk apa yang digemari ini dan laku terjual ini disampaikan produsen bordir untuk diproduksi lebih banyak.

Disamping memasarkan produksi bordir yang dihasilkan oleh pengusaha industri, juga para pemilik show room menerima pesanan dalam partai besar. Selanjutnya pemilik show room tinggal menghubungi produsen bordir untuk memproduksi sesuai pesanan konsumen baik itu dari segi bentuk, model, ukuran dan desain produksi.

Indikator teknologi ini adalah :

- a. Jenis dan jumlah alat produksi.
- b. Kecanggihan alat dibandingkan permintaan pasar
- c. Tingkat penguasaan alat terutama alat baru
- d. Perencanaan investasi alat baru

Gb. II.1. Skema Pendekatan Masalah



II. Pemberdayaan Industri Kecil

1. Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) merupakan sumber dan inspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa "*pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat*".

David C. Korten (1984) mengemukakan teori pelembagaan program dengan menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu dengan kemanfaatan yang dirasakan (beneficiaries), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program.

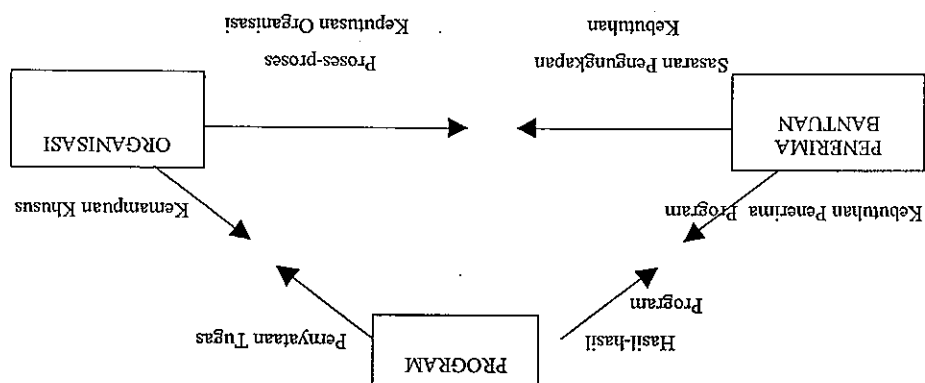
- kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program
- persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana,
- kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi

erat / singulis antata :

Menurut Korten (1984) tersebut, program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila tidak ada hubungan

Sumber : Diadaptasi dari buku People Centered Development (Davis C. Korten and Rudi Klauß, 1984)

Gb. II.1. Persyaratan Kelayakan Program



mengelola atau memenej program bantuan / dampungannya, dan *ketiga*; kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana.

Menurut teori *Stimulus – Needs Respons* (S-N-R), kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Kudus (Stimulus) akan mempengaruhi kebutuhan/keinginan (*needs*) para pengusaha bordir, manakala stimulus yang diberikan oleh Disperindag sesuai dengan kebutuhan pengusaha, maka akan timbul respon positif dari pengusaha, sehingga peluang pemberdayaan pengusaha bordir yang dilakukan oleh Disperindag akan berhasil.

Pada tingkatan teori menengah (*middle range theory*) permasalahan dapat dianalisis dengan menggunakan *Fit theory* atau teori kecocokan dari Korten dalam buku Tjokrowinoto (1989) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program dalam hal ini kegiatan pemberdayaan pengusaha bordir yang dilakukan oleh Disperindag manakala sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat mampu melakukan program/kegiatan, dan terlibat dalam penyusunan program/kegiatan.

Berdasarkan kajian teori di atas terlihat jelas bahwa tingkat keberhasilan/perkembangan industri kecil bordir dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dengan kebutuhan para pengusaha bordir.

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Jika ekonomi rakyat mendapat dukungan dari pemerintah dan pembinaan secara terpadu terhadap industri kecil, maka akan muncul kebangkitan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan (*empowerment*) pada awalnya timbul dari adanya paradigma pembangunan yang menempatkan negara telah dominan dalam melaksanakan pembangunan (Soetrisno, 1995). Selanjutnya Lukman Soetrisno mengemukakan bahwa paradigma ini banyak mendapat kecaman dari para ahli dan pengamat pembangunan negara-negara yang sedang berkembang. Kritik yang dikemukakannya adalah paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan masyarakat dalam membangun diri dari kelompok mereka sendiri. Model sentralistik tersebut tidak memberi kesempatan para rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pembangunan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

Pemberdayaan atau empowerment merupakan salah satu strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan berupaya untuk mengolah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk

merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri (*Loekman Soetrisno, 1995*).

Wujud pembangunan masyarakat yang demikian akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi dan lebih menjamin tumbuhnya *self sustaining capacity* masyarakat menuju *sustained development*. Oleh karena itu pembangunan masyarakat yang bersumber pada sumber daya manusia dengan pendekatan yang berakar pada sumber daya manusia dengan pendekatan derivatifnya yang berbentuk pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada komunitas, diharapkan dapat ikut mewujudkan *sustained development* lewat penerapan strategi empowerment.

Konsep empowerment sebagai konsep alternatif pembangunan memberikan tekanan pada ekonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi langsung (melalui partisipasi) demokrasi dan pembelajaran sosial pengalaman langsung (*Friedmann, 1992*). Sebagai titik fokusnya lokalitas, sebab civil society akan merasa siap diberdayakan lekat issue-issue lokal. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat tidak sebatas ekonomi saja, namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat memiliki posisi tawar secara nasional maupun internasional.

Segenap upaya pembangunan harus sudah didasarkan pada pencapaian pemerataan atas hasil-hasil pembangunan dan sedapat

mungkin memperkecil kesenjangan di masyarakat. Dalam menghadapi liberalisasi ekonomi, dimana perekonomian berfungsi menurut mekanisme pasar, maka pencapaian target-target pemerintahan memperkecil kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial, diharapkan bukan lagi slogan, tetapi sudah merupakan bagian operasional dari setiap kebijakan perekonomian nasional. Hal ini dicapai dengan upaya mengurangi dampak dari pengaruh liberalisasi perekonomian dunia yang tidak terkendali dengan melalui pendekatan pemberdayaan baik individu maupun kelompok masyarakat merupakan salah satu persyaratan pembangunan nasional.

Sistem adalah kesatuan antar elemen-elemen (in put, process, out put) yang saling terkait, dimana kerusakan / gangguan pada salah satu elemen sistem akan berpengaruh terhadap elemen yang lainnya secara keseluruhan.

Menurut pandangan teori sistem Disperindag adalah sebagai sub sistem atau bagian dari sistem yang lebih luas (Penda, Pasar, Masyarakat, Pengusaha) yang berarti aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah (Disperindag) dipengaruhi juga oleh variabel lingkungannya. Kebijakan, strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag untuk memberdayakan pengusaha industri kecil bordir juga dipengaruhi oleh kondisi pengusaha itu sendiri, pasar, masyarakat dan yang lainnya.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat (elemen proses) berdasarkan teori sistem dipengaruhi oleh kebutuhan pengusaha bordir (input), maknanya terdapat sinergi antara elemen input dan proses akan menghasilkan efektivitas pemberdayaan pengusaha bordir (output). Sementara itu, Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa pemberdayaan berarti untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. Sedangkan, Bryant & White (1987), lebih mengartikan pemberdayaan sebagai pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak yang lebih besar kepada si miskin.

Pengertian lain tentang pemberdayaan dari Freire (sebagaimana dikutip Loekman Soetrisno, 1995), bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber alam dan mendorong masyarakat mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang menindas (*oppressive*). Pendapat senada juga dikemukakan oleh *Moechtar* Mas'oed (1994), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat.

Bertolak dari fenomena tersebut *Friedmann* (1992) menawarkan strategi pembangunan yang populer disebut dengan *empowerment* (pemberdayaan). Lebih lanjut *Friedmann* mengemukakan bahwa hasil

interaksi pada tingkat ideologi antara konsep *growth strategy* dan *people centered* akan melahirkan konsep *empowerment* atau yang lebih akrab disebut dengan pembangunan. Konsep ini muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan dalam artian gagalnya model-model pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan ini, bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan cerminan nilai normatif dan moral. Kegagalan dan harapan semakin terasa pada tingkat individu dan masyarakat, karena pembangunan masyarakat adalah nilai kolektif dari pembangunan individu.

Sebagai konsep alternatif pembangunan, *empowerment* memberi tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, secara langsung melalui partisipasi demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas. Dengan asumsi bahwa *civil society* siap memberdayakan melalui isu-isu lokal. Namun Friedmann mengingatkan, bahwa tidak realistik apabila kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* diabaikan, karena pembangunan tidak secara politis, sehingga masyarakat akan memiliki *bargaining position* secara nasional maupun internasional.

Konsep pemberdayaan ini merupakan hasil dari proses interaktif di tingkat ideologi dan praktis. Ditingkat ideologis, merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up* antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Konsep ini tidak mempertentangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi bagaimana mensinergikan keduanya. Konsep ini bertitik tolak pada pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk terjadinya pertumbuhan.

Memperhatikan uraian di atas maka pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang didasari pada semangat *people centered*, dan bercirikan : *participatory, empowering and sustainable* dengan asumsi dasarnya bahwa setiap manusia memiliki potensi, daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, karena pada dasarnya manusia bersifat aktif dalam setiap upaya keberadaanya. Memberdayakan masyarakat dapat mengandung arti mengembangkan, memandirikan menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan (Priyono dan Pranarka, 1996 dalam Sedarmayanti, 2000).

Dengan mengacu pada rangkaian konsep di atas, maka konsep pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan dalam dimensi-dimensi berikut :

Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang luas dan cukup banyak ditelaah dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya, hanya saja satu dan yang lainnya berbeda dan sangat dipengaruhi oleh *interlinking factors* antara lain pengetahuan, kemampuan status, harta, kedudukan, jenis kelamin. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Pola hubungan seperti inilah yang akan diperbaiki dalam proses pemberdayaan.

Prijono (1996) melihat proses pemberdayaan memiliki kecenderungan :

- 1). Menekankan pada proses pemberian atau mengalihkkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.
- Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian, melalui organisasi dan biasa disebut kecenderungan primer.

2. Pendampingan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat

- 1). Pelibatan dalam perumusan kebijakan pengembangan
- 2). Pemberdayaan (pengembangan usaha, pembelajaran akan kemandirian usaha dan penguatan posisi tawar).
- 3). Kelangsungan hidup.

2). Sebagai proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan. Untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog dan diskusi dalam organisasi/kelompok secara bersama. Disini terjadi proses konsientisasi dengan cara menganalisis secara kritis situasi total mereka, termasuk melihat dimensi politiknya dan berusaha memperoleh kembali daya untuk mengubah situasi tersebut melalui aksi kolektif. Artinya, kaum miskin mulai belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya dan merancang solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan biasa disebut kecenderungan sekunder.

Sementara Moejarto (1993), menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses pematahan (*break down*) dari hubungan atau relasi subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Mubyarto (1994) lebih menekankan pada diri masyarakat itu sendiri sebagai hakekat pemberdayaan. Selanjutnya Moeljarto menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Sedangkan Mubyarto menyatakan bahwa hakekat/ inti dari pemberdayaan berada pada diri manusia/rakyat, sedangkan faktor luar hanyalah berfungsi sebagai perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk

memberdayakan, mengendalikan, mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu (Priyono dan Pranarka, 1996):

- i. Inisial, dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat.
- ii. Partisipatoris, dari pemerintah bersama masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat.
- iii. Emansipatoris, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

Pada tahapan ketiga, emansipatoris ; masyarakat sudah dapat menemukan eksistensi diri sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya, untuk dapat mewujudkan 2 (dua) persyaratan pokok, yaitu :

- 1). Perencanaan pembangunan.

- 2). Pelaksanaan program pembangunan.

Pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (1996) harus memiliki ciri antara lain :

1. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah.

2. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang akan dilakukan.

3. Karena Masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat dari ketidak berdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperatif*) dalam kelompok yang dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal.
4. menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan termasuk LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa suatu perencanaan pembangunan dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pemberdayaan masyarakat hendaknya bersifat *bottom-up*. Karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, sehingga dialah yang harus memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Hal ini selaras dengan yang diungkap Korten (1988) bahwa proses pembuatan keputusan harus benar-benar dikembalikan kepada rakyat, yang mempunyai kapasitas maupun hak untuk memasukkan kedalam proses pengambilan kebijakan.

Schumaker (1973) dalam proses pemberdayaan

masyarakat lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan politik. *Economic development can succes only if it is carried forward as a board popular "movement reconstruction" with teh primary emphasis on teh full utlization of teh drive, enthusiasm, intelligence and labour power of every one.* Sedangkan strategi

yang paling tepat adalah dengan memberi mereka sarana untuk mengembangkan diri, lebih lanjut Schumaker mengembangkan diri, lebih lanjut Schumaker memberi mereka sarana untuk mengembangkan proses pemberdayaan masyarakat NGO (*Non Governmental Organization*) memiliki tempat yang istimewa, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan

kelompok mandiri.

Suatu perencanaan pembangunan yang memiliki karakter pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada kebijakan strategi-strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi dasar tersebut mempunyai tiga arah (Sumodiningrat, 1999), yaitu :

1. Memilihkan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemanfaatan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.

3. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber para peran masyarakat lokal.

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dari tiga arah, yaitu :

1. Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
3. Melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah, mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Lebih lanjut Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan yaitu :

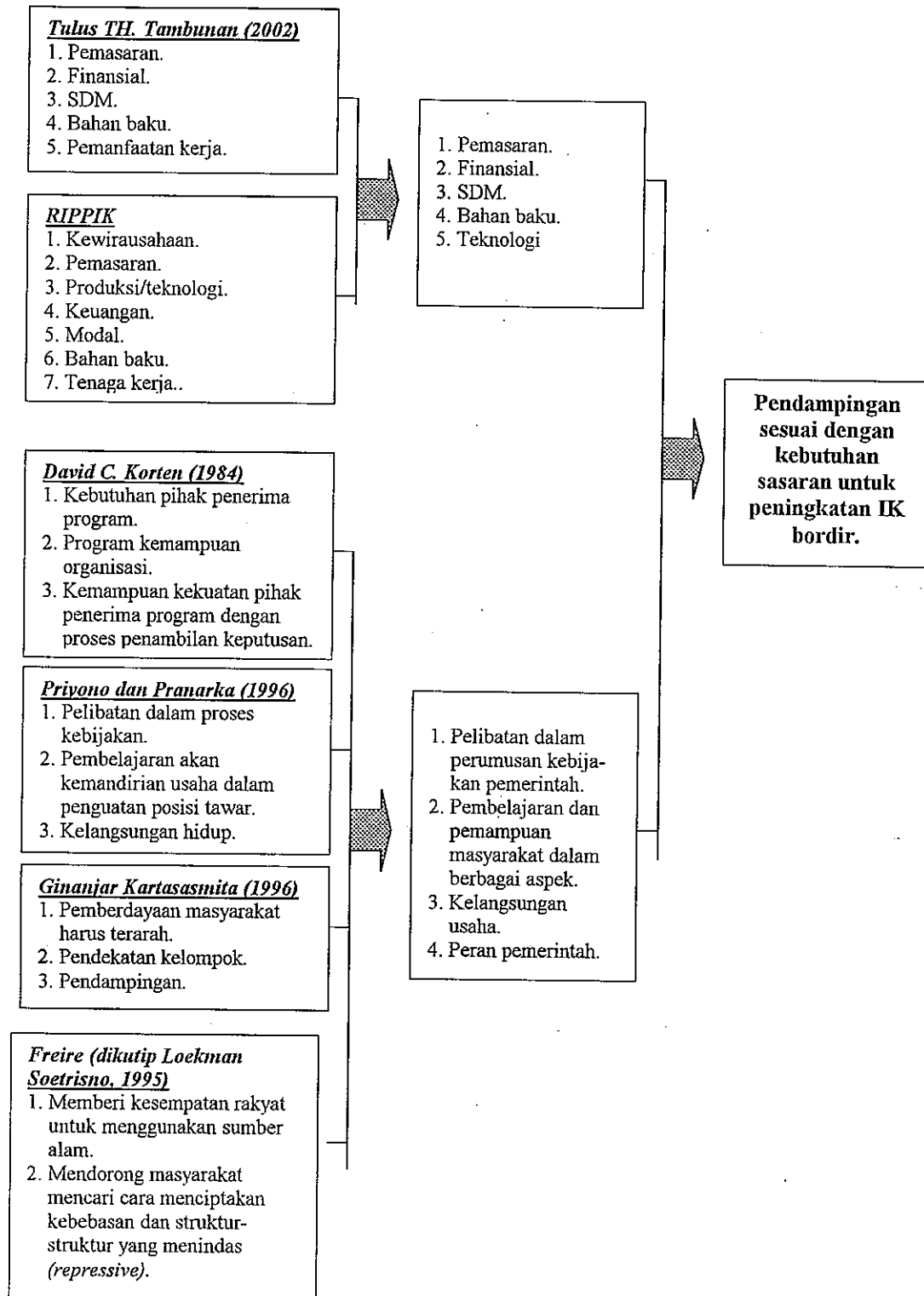
1. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (*targeted*) atau pemihakan kepada yang miskin/lemah.
2. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama.
3. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan pembentukan kelompok masyarakat dilakukan oleh pendamping, yang sifatnya lokal, teknis dan khusus.

Strategi dan pendekatan pembangunan tersebut

memfokuskan pada keunggulan potensi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pembangunan dengan memberi kekuatan, kesempatan dan kekeluargaan individu, kelompok sasaran lokal, masyarakat serta struktur kelembagaan (*capacity, capability and institutionally locally*) agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi pemerintah. Pendekatan ini berusaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi pemerintahan. Karena birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik lebih berperan dan melakukan fungsi sebagai *steering organization* ketimbang sebagai *rowing organization* untuk menjamin tumbuhnya *self sustaining capacity* masyarakat menuju *sustained development* seperti yang disarankan Osborne dan Gabler, 1992 (dalam Supriatna, 2000).

Dengan memperhatikan berbagai faktor yang membeli pengembangan usaha/industri kecil dan konsep-konsep pengembangan masyarakat yang ada, maka konsep pemberdayaan untuk mencari jawaban masalah ke 1 dan 2 penelitian ini digambarkan dengan gambar II.2 sebagai berikut.

Gb. II.2. PENDEKATAN PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Desain riset pada hakekatnya merupakan penggambaran cara-cara seorang peneliti guna memenuhi tujuan studi yang ditetapkan atau dengan kata lain desain riset merupakan suatu rencana logis untuk menganalisis masalah. Dengan melihat desain riset dapat diketahui arah dan tujuan dari penelitian.

Tujuan dari penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial/gejala sosial/ peristiwa (event) sosial (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995:16). Menurut tipe, penelitian digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian penjajakan (eksploratif), penjelasan (eksplanatory) dan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual dan sifat populasi (M. Singarimbun & Sofian E, 1991:44).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan rancangan tipe penelitian deskriptif-analitis, yakni pendekatan penelitian **deskriptif**, yaitu yang menjelaskan fenomena/gejala yang ada didalam pemberdayaan industri kecil bordir di Kabupaten Kudus, untuk memenuhi tujuan penelitian, yakni untuk :

1. Untuk mendeskripsikan pola pemasaran , kondisi finansial, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, kemudahan bahan baku serta penggunaan teknologi industri kecil bordir Kudus.

2. Untuk mengetahui kebutuhan dampingan pada ke 5 aspek di atas sebagai masukan penyusunan pola pembinaan yang tepat oleh dinas Pemerintah dalam pengembangan industri kecil bordir Kudus. Meliputi :
 - a. Deskripsi dan analisis tentang pelibatan masyarakat (*participatory*) dalam ketepatan perumusan kebijakan pemerintah di bidang industri kecil bordir Kudus
 - b. Deskripsi dan analisis tentang upaya pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah dan merumuskan upaya pemberdayaan (*empowering*) yang tepat bagi masyarakat industri kecil bordir Kudus untuk masa-masa mendatang (apakah dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat atau dari masyarakat bersama masyarakat untuk masyarakat)
 - c. Deskripsi dan perumusan strategi maupun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk regenerasi / kelangsungan (*sustainability*) dan perbaikan posisi tawar (*bargaining position*) usaha industri kecil bordir Kudus di masa datang,
 - d. Deskripsi dan analisis tentang format peran pendampingan yang tepat dari Diperindag dan Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus seperti yang diharapkan masyarakat industri kecil bordir Kudus

B. Variabel Penelitian

Penentuan fokus penelitian dimaksud untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh

pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan masalah tujuan penelitian.

Maleong (1996), dalam fokus penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Penetapan fokus penelitian dapat memberikan batas bidang "inkuiri" atau akan membatasi dari pada upaya penemuan teori dasar, maka dilapangan penelitian yang lain tidak dimanfaatkan lagi.

2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion*) terhadap informasi yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi tentang pemasaran, keuangan, tenaga kerja, bahan baku dan teknologi (pola dan hambatan)
2. Konsep pendampingan dengan memperhatikan :

- Proses perumusan kebijakan dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan industri kecil bordir Kudus

- Upaya pemberdayaan masyarakat industri kecil bordir Kudus
- Perbaikan terus menerus posisi tawar sebagai upaya Regenerasi dan kelangsungan usaha industri kecil bordir Kudus

- Peran pemerintah dalam pengembangan usaha industri kecil bordir Kudus.

Untuk memperjelas fokus kajian berikut tabel variabel dan jabaramnya :

TABEL III.1. VARIABEL, DIMENSI DAN INDIKATOR PENELITIAN

1. Identifikasi Faktor Pengembangan Industri (kuantitatif)

VARIABEL	INDIKATOR
PEMASARAN	(1). Saluran distribusi (a. produsen – pengecer – konsumen, atau b. produsen – konsumen) (2). Jangkauan pemasaran (lokal, regional, nasional, internasional) (3). Sumber desain (dari perusahaan sendiri, pemesan/buyer, gabungan berbagai sumber) (4). Media Promosi (5). Merk Dagang (6). Kemasan
KEUANGAN	(1). Besar modal awal (2). Struktur modal (3). Kebutuhan modal kerja (4). Kebutuhan modal investasi (5). Kemudahan mengakses sumber modal
SUMBERDAYA MANUSIA	(1). Ketercukupan jumlah pegawai (manajerial & teknis) (2). Kualitas pegawai tingkat manajerial (3). Ketrampilan kerja pegawai (4). Perencanaan tenaga kerja (5). Kejelasan Pembagian Kerja (6). Pemberiaan penghargaan (7). Pelatihan
BAHAN BAKU	(1). Kemudahan mencari bahan baku (2). Keterjangkauan harga bahan baku (3). Kualitas Bahan baku di pasaran

	TEKNOLOGI
(4). Sistem pengadaan bahan baku (rutin/ pesanan)	(1). Jenis dan jumlah alat produksi yang dimiliki (2). Kecanggihan / kemernadatan alat dibandingkan permintaan pasar (3). Tingkat penguasaan alat baru (4). Perencanaan pengadaan alat baru

2. Identifikasi Kebutuhan Dampungan (Harapan dan kenyataan) kualitatif

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BORDIR	1. Pelibatan dalam perumusan kebijakan pemerintah.	(1). Kelibatan dalam kegiatan perumusan kegiatan instansi pendamping. (2). Intensitas diminta masukan oleh instansi pendamping (3). Intensitas memberi masukan atau meminta dampungan pada instansi pendamping
	2. Pembelajaran dan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek	(1) Pembelajaran dalam pencarian dan pemupukan modalan (2) Pembelajaran dalam teknologi industri (3) Pembelajaran dalam pemasaran
	3. Kelangsungan usaha	(1). Tingkat pengembangan usaha yang dilakukan (2). Tingkat keseriusan dalam memperbaiki posisi tawar dengan berbagai pihak (3). Tingkat keseriusan dalam pengusahaan regenerasi usaha
	4. Peran pemerintah	(1). Tingkat kebutuhan dampungan dari pemerintah (2). Tingkat kemandirian akibat dampungan dari pemerintah (3) Tingkat ketergantungan pada dampungan pemerintah

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota dan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Dua wilayah kecamatan tersebut merupakan sentra industri kecil bordir Kudus.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini pada pokoknya digolongkan menjadi dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden/informan, yakni pengusaha bordir. Sedangkan data sekunder didapat dari monografi, dokumen dan catatan lainnya yang diperoleh dari instansi terkait.

2. Sumber Data

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diajukan perlu dicari data-data yang mendukung. Adapun sumber data diperoleh sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer.

Kuantitatif : Pengusaha bordir, Triangulasi secara kualitatif kepada : Pejabat Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan pejabat pada Dinas Perindag Prop. Jateng serta instansi terkait yang menangani pembinaan IKM.

b. Sumber Data Sekunder : instansi terkait pengembangan industri kecil bordir Kabupaten Kudus.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban (terstruktur) dan

2. Pertanyaan terbuka sebagai *interview guide* untuk wawancara mendalam.

F. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi merupakan keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau dua beberapa ciri atau karakteristik yang sama (Anton Dayan, 1996:110).

Dalam penelitian ini populasinya adalah : seluruh pengusaha bordir yang ada di 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Kota dan Kecamatan Gebog, yakni sebanyak 113 unit usaha bordir.

b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian (Anton Dayan, 1996:65). Dalam penelitian ini elemen penelitiannya adalah : pengusaha bordir, yakni sebanyak 38 unit usaha bordir atau sebesar 30 %.

Besar sampel dan pemecahan unsur sampel terlihat dalam tabel berikut :

TABEL III.2

POPULASI DAN SAMPEL

NO	KECAMATAN	DESA SENTRA	POPULASI	SAMPEL (30 %)
1	KOTA	1. LANGGAR DALEM 2. JANGALAN 3. KAJEKSAN 4. DEMANGAN	6 UNIT 18 UNIT 30 UNIT 12 UNIT	2 UNIT 6 UNIT 10 UNIT 4 UNIT
2	GEBOG	1. KARANGMALANG 2. PADURENAN	29 UNIT 18 UNIT	10 UNIT 6 UNIT
	JUMLAH		113 UNIT	38 UNIT

Sumber : Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Kudus, th 2003

- c. Teknik sampling : teknik pengambilan sampel dilakukan secara *simple random sampling*, atau pengambilan sampel secara acak sederhana, yakni dengan membuat daftar pengusaha atau unit usaha bordir di 2 kecamatan kemudian mengambil secara acak dari 113 unit diambil sejumlah sampel sebanyak yang diperlukan (38 unit usaha atau 30 %).

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Penyebaran Instrumen Penelitian/Questioner.

Pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis/angket.

2. Wawancara Mendalam

Yaitu teknik pengumpulan dari informan kunci dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (dengan *guided interview* dan *in depth interviewing*) dari pengusaha bordir dan pegawai Disperindag yang terkait

3. Observasi

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, serta pengusaha bordir.

4. Dokumentasi.

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis (dokumen-dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian (data sekunder)

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisa data kuantitatif dengan statistik deskriptif, untuk mengenali kecenderungan pengumpulan data (frekuensi dan persentase), dan
2. Analisis kualitatif dengan memahami, menjelaskan dan menginterpretasikan jawaban dari informan maupun responden untuk mencari pola dan kecenderungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

a. Letak Geografi

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di antara 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati sebelah selatan dengan Kabupaten Pati dan Grobogan serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Letak Kabupaten Kudus antara $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 41'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan, jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

b. Luas Penggunaan Lahan

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 124 Desa serta 7 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 ha atau sekitar 1,31 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 ha (20,19 %). Sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 ha (2,46 %) dari luas Kabupaten Kudus.

Luas yang ada terdiri dari 21.704 ha (51,04 %) merupakan lahan sawah dan 20.812 ha (48,96 %) adalah bukan lahan sawah. Jika dilihat

menurut penggunaannya. Kabupaten Kudus terdiri atas lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 4.203 ha (9,88 %) dan sisanya pengairan ½ teknis sederhana tadah hujan dan lainnya. Sedangkan bukan lahan sawah yang digunakan untuk bangunan dan halaman sekitar seluas 9.983 ha (23,48 %) dari luas Kabupaten Kudus.

TABEL IV.1

LUAS WILAYAH DAN PROSENTASE MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS.

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Prosentase
1.	Kaliwungu	3.271	7.69
2.	Kota	1.047	2.46
3.	Jati	2.630	6.19
4.	Undaan	7.177	16.88
5.	Mejobo	3.677	8.65
6.	Jekulo	8.292	19.50
7.	Bae	2.332	5.48
8.	Gebog	5.506	12.95
9.	Dawe	8.584	20.19
	Jumlah	42.516	100

Sumber : Dipertan olahlan BPS Kab. Kudus Tahun 2002.

2. Penduduk dan Tenaga Kerja.

a. Kependudukan.

Dari data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan

baik dibidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2002 tercatat sebesar 719.193 jiwa, terdiri dari 354.899 (49,35 %) jiwa laki-laki dan 364.294 (50,65 %) jiwa perempuan. Apabila dilihat penyebarannya maka Kecamatan yang paling tinggi prosentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Kota, yakni sebesar 12,75 % dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus. Kemudian berturut-turut Kecamatan Jekulo 12,57 % dan Kecamatan Dawe 12,47 %. Sedangkan Kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8.18 %

Bila dilihat dari pebandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2002 sebesar 97,42 % yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Ini bisa dilihat di semua Kecamatan bahwa angka rasio jenis kelamin dibawah 100, yaitu berkisar antara 93,88 dan 99,69.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (1998 – 2002) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2002 tercatat sebesar 1.692 jiwa setiap kilo meter persegi. Disisi lain persebaran penduduk masih belum merata. Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 8.753 jiwa per km^2 . Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 914 jiwa per km^2 .

Jumlah rumah tangga sebanyak 176.040 dan diperoleh rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar 4.085. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yaitu 4,09 %.

Jumlah kelahiran selama tahun 2002 sebanyak 9.385 bayi, terdiri dari 4.857 bayi laki-laki dan 4.528 bayi perempuan. Pada tahun 2002 ini diperoleh angka kelahiran kasar sebesar 13.095, terdapat penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2001 yaitu 15.56. sedangkan jumlah kematian selama tahun 2002 sebanyak 4.759 jiwa terdiri dari 2.516 laki-laki dan 2.243 perempuan.

b. Keluaraga Berencana.

Peserta KB pada tahun 2002 mencapai 96.358 peserta (peserta aktif). Pada tahun yang sama, peserta KB baru tercatat 12.219 peserta, turun 10,19 % dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh peserta KB aktif tahun 2002, sebesar 17,96 % peserta menggunakan etode kontrasepsi jangka panjang (MKLP) antara lain AKDR, MOP, MOV dan susuk. Suntik merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak diminati oleh peserta KB aktif yaitu sebesar 61,01 %. Sedangkan kontrasepsi suntik ini mencapai angka 76,44 %. Peran swasta dalam hal ini banyak mendukung program Keluarga Berencana, terbukti bahwa peserta KB Mandiri mencapai 73,12 % dari total peserta KB aktif.

c. Tenaga Kerja.

Tenaga kerja yang terampil, merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong

era globalisasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap angkatan kerja.

Sektor industri masih menjadi gantungan hidup tenaga kerja di Kabupaten Kudus, terbukti sekitar 38,43 % mempunyai lapangan usaha di sektor tersebut. Sektor lain selain sektor industri yang paling banyak adalah sektor perdagangan dan sektor pertanian, masing-masing sebesar 17,00 % dan 18,74 %.

d. Transmigrasi.

Upaya untuk memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja antara lain melalui program transmigrasi. Kepadatan penduduk yang belum merata akan berdampak pada berbagai aspek. Banyaknya transmigran di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2002 sebanyak 35 mengalami penambahan sebanyak 26 keluarga keluarga bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Tidak semua kecamatan mengirimkan transmigran ke luar Jawa, terlihat Kecamatan Jati merupakan kecamatan yang terbanyak yaitu 9 keluarga dengan 19 jiwa.

Jenis transmigrasi swakarsa paling banyak diminati oleh transmigran asal Kudus yaitu sebanyak 20 keluarga (56 %). Daerah tujuan yang banyak diminati pada tahun anggaran ini adalah Kalimantan Barat dan Maluku sebanyak 11 keluarga, Jambi (5 keluarga), Sulawesi Selatan dan Aceh (4 keluarga) dan Sumatera Barat (1 keluarga).

TABEL IV.2

BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS
KELAMIN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
00 - 04	35.018	30.669	65.687
05 - 09	32.702	37.421	70.123
10 - 14	39.760	31.517	71.277
15 - 19	38.955	44.991	83.946
20 - 24	29.758	32.535	62.293
25 - 29	26.808	31.260	58.068
30 - 34	28.678	21.322	50.000
35 - 39	22.337	32.529	54.866
40 - 44	27.885	24.690	52.575
45 - 49	18.316	18.878	37.194
50 - 54	14.924	15.502	30.426
55 - 59	15.905	9.947	25.852
60 - 64	9.292	12.134	21.426
65 - 69	6.254	8.928	15.182
70 - 74	5.716	8.681	14.437
75 +	2.591	3.290	5.881
Jumlah	354.899	364.294	719.193

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.

TABEL IV.3
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kaliwungu	41.643	42.666	84.309
Kota	44.403	47.297	91.700
Jati	42.917	44.975	87.892
Undaan	32.546	33.020	65.566
Mejobo	31.370	32.145	63.515
Jekulo	44.691	45.715	90.406
Bae	29.181	29.660	58.841
Gebog	43.375	43.903	87.278
Dawe	44.773	44.913	80.686
Jumlah	354.899	364.294	719.193

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.

3. Kondisi Sektor Industri.

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 62,22 % terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Menurut BPS, industri besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 20 s/d 99 orang, industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja antara 5 s/d 19 orang dan industri rumah tangga punya tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Perusahaan industri besar/sedang di Kabupaten kudus tahun 2002 tercatat sebanyak 169 perusahaan dengan menyerap 71.619 orang tenaga kerja. Meskipun

jumlah usaha mengalami penurunan sebesar 21,76 % tetapi penyerapan terhadap tenaga kerja meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah tenaga kerja sebesar 4,25 %.

Penyebab berkurangnya jumlah usaha industri besar/ sedang antara lain disebabkan oleh berkurangnya tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan tersebut sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai industri besar/ sedang, atau berpindahnya jenis kegiatan ke sektor lain (seperti misalnya ke sektor perdagangan).

Sedangkan dilihat dari jenis komoditi, perusahaan industri tembakan masih mendominasi dengan 33,14 % dari total usaha industri besar/ sedang, diikuti industri makanan dan minuman 14,2 %, konveksi dan kertas masing-masing 11,83 %. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakan yaitu sebesar 77,78 % diikuti industri kertas 9,48 persen dan tekstil 3,5 %.

Tabel IV.4

Data Perkembangan Industri Tahun 2000 s/d 2002 di Kabupaten Kudus

Urutan	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
Unit Usaha	13.096	12.265	13.063
Tenaga Kerja	146.681	132.043	149.418
Nilai Investasi (Juta Rp.)	671.830,66	669.241,32	2.260.489,28
Nilai Produksi (Juta Rp.)	4.811.862,50	4.571.212,37	4.937.159,80

Sumber : Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus.

Menurut Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, jumlah industri kecil/menengah di Kabupaten Kudus tahun 2002 mengalami kenaikan 1,5 %, yaitu dari 12.831 unit menjadi 13.027 unit. Sedangkan tenaga kerja naik menjadi 13.348 orang. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud industri kecil disini adalah usaha industri yang memiliki aset bersih (selain tanah dan bangunan tempat usaha) kurang dari 200 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari atau sama dengan satu milyar.

TABEL IV.5
BANYAKNYA INDUSTRI KECIL/MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2001 – 2002

Kecamatan	2001		2002	
	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja
Kaliwungu	2.230	7.027	2.308	7.202
Kota	3.442	13.585	3.528	13.828
Jati	2.893	11.711	2.898	11.726
Undaan	366	1.405	366	1.406
Mejobo	1.063	3.748	1.065	3.758
Jekulo	673	2.108	674	2.110
Bae	584	1.874	599	1.903
Gebog	849	2.811	858	2.837
Dawe	731	2.577	731	2.578
	12.831	46.846	13.027	47.348

Sumber : Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus.

TABEL IV.6

DATA PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL BORDIR TAHUN 2000 S/D

2002 DI KABUPATEN KUDUS

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Juta Rp.)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
Tahun 2000	137	3.176	7.820.203,66	46.666.306,66
Tahun 2001	239	3.198	9.866.623,94	64.802.049,39
Tahun 2002	243	3.329	11.586.769,88	80.917.047,73

Sumber : Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus pada tahun 2001 semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2002. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 1993, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,18 %. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 1993 di Kabupaten Kudus pada tahun 2001 sebesar 3.185.798,23 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 9.373.963,04 juta rupiah, naik 17,44 % dibanding tahun sebelumnya.

Menurut sektor ekonomi dari 9 sektor yang ada, sektor industri pengolahan tetap menjadi primadona dalam memberikan andilnya terhadap PDRB seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Tercatat, kontribusi sektor industri pengolahan untuk PDRB tahun 2001 atas dasar harga berlaku sebesar 62,22 %, diikuti oleh komoditas perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,25 %. Sedangkan kontribusi dari sektor pertanian dan sektor yang lain masih dibawah

10 %, sektor pertanian sebesar 3,93 %, sektor keuangan 2,91 %, sektor jasa sebesar 2,51 %, sektor pengangkutan dan komunikasi 1,75 %.

Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian di Kabupaten Kudus, walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten dengan wilayah terkecil, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan.

Mulai tahun 1997 kontribusi dari sektor industri pengolahan terlihat fluktuatif stabil ke atas. Pada tahun 1997 kontribusi sektor ini mulai mengalami peningkatan kembali menjadi 60,98 %, tahun 1998 naik menjadi 61,07 % dan tahun 1999 menjadi 62,26 %. Tetapi pada tahun 2000 turun menjadi 62 % dan kembali naik 0,22 % di tahun 2001 yang lalu.

Suatu proses industrialisasi dimana perkembangan sektor industri pada umumnya akan dilanjutkan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan dan menurunnya aktivitas pertanian. Terlihat bahwa selama beberapa dekade ini sektor perdagangan selalu memberikan kontribusi terbesar kedua, lebih besar dari kontribusi sektor pertanian. Kurang berperannya sektor pertambangan dan penggalian dalam perekonomian di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari kontribusinya yang paling kecil, hanya sebesar 0,03 %. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kudus bukanlah daerah yang berpotensi besar untuk dilakukan penambangan ataupun penggalian, mengingat kondisi geografis yang ada.

Berbeda dari tahun sebelumnya laju pertumbuhan PDRB tertinggi atas dasar harga konstan pada tahun 2001 terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih

sebesar 19,93 % diikuti sektor keuangan sebesar 17,74 % melambung pesat dari tahun sebelumnya tercatat - 3,41 5. sedangkan sektor perdagangan dimana pada tahun sebelumnya mengalami laju pertumbuhan sebesar 2,35 % merupakan laju pertumbuhan terendah dibanding sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2001 ini sektor sekunder tetap memiliki kontribusi terhadap PDRB paling besar. Atas dasar harga berlaku kontribusi sektor sekunder pada tahun 2001 sebesar 63,62 %, disusul kemudian sektor tersier sebesar 32,43 % dan kontribusi terkecil adalah sektor primer sebesar 3,95 %. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor primer di Kabupaten Kudus sangat kecil dominasinya dibandingkan dengan kedua sektor yang lain sehingga layaklah jika Kabupaten Kudus disebut sebagai daerah modern.

Atas dasar harga berlaku Kecamatan Kaliwungu memiliki PDRB perkapita tertinggi yakni sebesar Rp. 32.844.461,04,- diikuti Kecamatan Kota dan Jati masing-masing sebesar Rp. 29.719.827,15 ,- dan Rp. 17.293.735,35. Sedangkan PDRB perkapita terkecil masih dipegang Kecamatan Dawe sebesar Rp. 2.876.906,25,-. Dan secara keseluruhan PDRB per kapita Kabupaten Kudus untuk tahun 2001 sebesar Rp. 13.185.771,92,-

TABEL IV.7
 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA
 BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN KUDUS
 TAHUN 1997 – 2001
 (Jutaan Rupiah).

Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian	165.226,25	273.821,45	260.600,93	323.500,82	367.943,42
Pertambangan dan Penggalian	1.779,86	1.962,71	2.319,79	2.456,70	2.729,81
Industri Pengolahan	2.827.799,82	4.068.146,47	4.566.486,08	4.948.752,88	5.832.745,65
Listrik, Gas dan Air	20.340,67	23.550,31	30.934,64		56.962,97
Bangunan	64.141,74	61.485,16	1.926.883,63		73.838,50
Perdagangan, Hotel & Restoran	1.244.375,33	1.813.386,48	107.485,04		2.367.187,86
Pengangkutan dan Komunikasi	75.713,69	96.674,54	183.700,81		164.354,37
Bank/Lembaga Keuangan Lainnya	108.213,59	138.794,98	191.172,73		270.907,21
Jasa-jasa	129.441,53	183.788,25			235.293,26
Total PDRB	4.637.032,48	6.661.610,35	7.334.370,00	7.982.228,20	9.373.963,04

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.

TABEL IV.8

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN KUDUS

TAHUN 1997 – 2001

(Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian	109.733,10	102.257,26	97.646,90	99.953,57	105.161
Pertambangan dan Penggalian	1.482,10	1.458,97	1.481,98	1.489,75	1.560
Industri Pengolahan	2.090.794,70	1.843.793,73	1.851.735,37	1.866.748,67	1.915.645
Listrik, Gas dan Air	18.581,30	17.158,57	19.662,54	19.764,92	23.703
Bangunan	47.424,58	27.866,72	28.102,29	28.711,87	29.715
Perdagangan, Hotel & Restoran	915.756,05	810.482,68	812.843,19	852.140,09	872.132
Pengangkutan dan Komunikasi	52.197,08	48.869,48	51.754,16	53.852,35	55.777
Bank/Lembaga Keuangan Lainnya	77.316,29	72.412,04	85.469,86	83.522,16	98.340
Jasa-jasa	95.153,53	83.375,48	80.626,38	81.434,49	83.756
Total PDRB	3.408.438,73	82.375,48	3.030.322,67	3.087.617,87	3.185.798

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.

B. Hasil Penelitian

1. Identitas Responden dan Informan

a. Responden

Proposal mengambil sampling wilayah di Desa Janggalan dan Desa Langgar Dalem. Di Kecamatan Kota sentra industri bordir lebih banyak di Desa Kajeksan dan berdasarkan hasil di lapangan bersama aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diperoleh beberapa responden tempat penelitian, diantaranya :

Kecamatan Gebog :

- Desa Pedurenan : 6 responden.
- Desa Karang Malang : 10 responden.

Kecamatan Kota :

- Desa Demangan : 4 responden.
- Desa Kajeksan : 10 responden.
- Desa Janggalan : 6 responden.
- Desa Langgar Dalem : 2 responden.

Jumlah responden = 38 unit usaha

DAFTAR RESPONDEN DAN IDENTITASNYA

TABEL IV. 9

No	Nama Pengusaha	Asal Desa	Umur	Omset (Rp)
1	Arif Ariyanto	Pedurenan	11 Bulan	15.000.000
2	Muhammad Anshari	Pedurenan	36 Tahun	100.000.000
3	Miftahul Rahmat	Pedurenan	6 Tahun	50.000.000
4	Khusrul Khatimah	Pedurenan	16 Tahun	15.600.000
5	Bp Ainudin	Pedurenan	23 Tahun	50.000.000
6	Maskan	Pedurenan	20 Tahun	10.000.000
7	Aisyah	Karang malang	5 Tahun	5.000.000
8	Sukir	Karang malang	20 Tahun	2.500.000
9	Sholihah	Karang malang	10 tahun	3.000.000
10	Sukini Nikmah	Karang malang	12 Tahun	800.000
11	Sri Amni	Karang malang	20 Tahun	25.000.000
12	Kayanah	Karang malang	13 Tahun	10.000.000
13	Siti Khalimah	Karang malang	8 Tahun	6.000.000
14	Sumarni	Karang malang	9 Tahun	75.000.000
15	Suparti	Karang malang	10 Tahun	10.000.000
16	Sa'adah	Karang malang	15 Tahun	25.000.000
17	Rokhis	Kajeksan	12 Tahun	3.000.000
18	Nuraniyah	Kajeksan	5 Tahun	15.120.000
19	Suwarti	Kajeksan	30 Tahun	10.000.000
20	Haranti	Kajeksan	20 Tahun	70.000.000
21	Sukarti	Kajeksan	8 Tahun	5.750.000
22	Siti asnah	Kajeksan	20 Tahun	6.000.000
23	M Masudi	Kajeksan	8 Tahun	15.000.000
24	Rohmad	Kajeksan	20 Tahun	20.000.000
25	Mufliah Ridwan	Kajeksan	5 Tahun	
26	Siti	Kajeksan	30 Tahun	1.980.000
27	Teddy Arnianto	Janggalan	10 Tahun	30.000.000
28	Yuli Akhmad	Janggalan	25 Tahun	150.000.000
29	Nuryula	Janggalan	32 Tahun	20.000.000
30	Rifki Falah	Janggalan	30 Tahun	20.000.000
31	Maskub	Janggalan	12 Tahun	40.000.000
32	Aliya Hikmah	Janggalan	28 Tahun	30.000.000
33	Hizmi Munawar	Janggalan	11 Tahun	20.000.000
34	Endang R	Janggalan	12 Tahun	30.000.000
35	Mufrihah	Janggalan	6 Tahun	12.000.000
36	Bambang G	Janggalan	8 Tahun	6.000.000
37	Najib	Janggalan Dalam	4 Tahun	10.000.000
38	Achmad Barhan	Janggalan Dalam	14 Tahun	3.000.000

1). umur usaha

TABEL IV. 10
UMUR USAHA

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	4 tahun s/d 11 tahun	16	42,1
2	12 tahun s/d 19 tahun	7	18,4
3	20 tahun s/d 27 tahun	9	23,7
4	28 tahun atau lebih	6	15,8
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari Identitas Responden pertanyaan nomor 2

Dilihat dari lamanya usaha yang dijalankan oleh para pengusaha/pengrajin industri kecil bordir menunjukkan ternyata sebagian besar telah melakukan usaha selama 4 s/d 11 tahun (42,1 %), sedangkan umur usaha 20 s/d 27 tahun sebanyak 15,8 %. Data ini tercermin pada tabel IV.10.

2). Omset per bulan

TABEL IV.11
OMSET PER BULAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	800.000 s/d 38.100.000	30	78,9
2	38.100.001 s/d 75.400.000	5	13,2
3	75.400.001 s/d 112.700.000	1	2,6
4	112.700.001 atau lebih	1	2,6
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari Identitas Responden pertanyaan nomor 3

Dilihat dari sisi omset per bulan, menunjukkan bahwa omset sebesar Rp. 800.000,- s/d Rp. 38.100.000,- sebanyak 78,9 %, sedangkan omset sebesar Rp. 38.100.001,- s/d Rp. 75.400.000,- sebanyak 13,2 % dan omset diatas Rp. 75.400.000,- sebanyak 2,6 %. Data omset per bulan terlihat dalam tabel IV.11.

b. Informan

Dalam wawancara secara mendalam terhadap para pengusaha industri kecil bordir di Kabupaten Kudus terungkap hal-hal sebagai berikut :

Ibu Sholikhah, Karangmalang mempunyai usaha/industri bordir yang sudah berjalan selama 10 tahun. Industri bordir yang diberi nama "Restu" ini mempekerjakan 20 tenaga kerja. Ada yang membawa pulang bahan baku untuk dikerjakan di rumah dan menjadi bahan jadi, akan diambil suami Ibu Sholikhah. Dalam mengoperasikan industri bordir, Ibu Sholikhah dibantu keluarganya, seperti suami dan adiknya.

Industri bordir Restu memproduksi antara lain busana muslim, kebaya dan kerudung. Omset yang dihasilkan sebanyak Rp 3.000.000,- per bulan. Meskipun industri bordir ini telah berjalan selama 10 tahun, Ibu Sholikhah tidak mengikuti atau bergabung dalam kelompok yang menjadi binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kudus. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan (transparansi) didalam proses pembinaan. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat prioritas dari pemerintah sehingga industri miliknya yang tergolong kecil tidak mendapat kesempatan menerima dan mengakses pelayanan dari pola pembinaan dari pemerintah.

Sementara itu industri yang dimiliki oleh Ibu Sukini Nikmah sudah berjalan selama 12 tahun dan merupakan salah satu anggota kelompok binaan

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kudus. Kelompok binaan ini memiliki 15 anggota industri bordir di Desa Karang Malang. Industri bordir “Dewi Kunti” ini mempekerjakan sebanyak 12 tenaga kerja. Industri bordir ini memproduksi busana muslim, kerudung dan kebaya dengan omset per bulan sebesar Rp 800.000,-. Sebagai anggota kelompok “Teratai Jaya”, Ibu Sukini Nikmah banyak mengikuti pertemuan yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Dengan adanya pertemuan ini, Ibu Sukini Nikmah mendapatkan banyak informasi tentang perkembangan bordir baik pameran maupun permodalan.

Dalam pemasaran produknya, Ibu Aliyah, Karangmalang memasarkan produknya melalui berbagai cara. Salah satunya, ia memasarkan produknya langsung kepada para konsumen yang datang secara khusus ketaempat usaha sekaligus kediamannya. Namun terkadang ada pembeli yang membeli produknya dengan jumlah banyak untuk dipasarkan kembali di kota lain.

Sedangkan Bp. Muhammad Ansori dari Pedurenan menyatakan bahwa produknya dipasarkan melalui pengecer dan yang paling sering pedaganganya mengambil sendiri produk yang dipesannya. Pemasaran yang paling jauh sudah ke luar propinsi. Produknya sudah punya merk tapi tidak dipasang karena permintaan dari pelanggan yang minta barang tanpa merk bahkan tanpa kemasan. Promosi untuk menyebarluaskan informasi tentang produknya biasanya dari mulut ke mulut dan menawarkan produknya ke pengecer atau pedagang yang lebih besar.

Produk yang dihasilkan sangat berkualitas dan untuk kalangan menengah sehingga pemasarannya pun berdasarkan pesanan saja, yaitu kerjasama dengan pengecer. Media promosi yang paling diandalkan adalah melalui pameran. Produknya sudah dikemas dalam kemasan. Sudah punya merk dagang sendiri. tapi sampai sekarang belum bisa mengekspor.

Lain halnya dengan Bp. Ainudin yang mampu memasarkan produknya dengan sangat baik, saluran distribusinya yang paling jauh adalah sampai diluar propinsi, yaitu Jatim (Tuban dan Malang), Kalimantan (Pontianak), dengan cara mempunyai perwakilan atau agen didaerah masing-masing. Sementara untuk pasar lokal, daerah Eks. karsidenan Pati beliau memasararkannya di Pasar Kliwon, yang menjadi pusat produk-produk bordir selain pasar Klewer, Solo. Produk Bp. Ainudin sudah memiliki Merk, yaitu Sinar Jaya, yang dikemas dalam bungkus plastik dan sudah mempunyai izin usaha. Selama ini produknya bisa dikenal melalui pameran yang pernah diikuti di Bali, Semarang, Jakarta. serta melalui konsumen yang membeli produknya.

Sementara itu pengusaha bordir Siti Asnaah, Kajeksan melanjutkan usaha bordir ini dari mertuanya, yang sampai saat ini sudah berjalan sekitar 20 tahunan. Produk yang dihasilkan meliputi mukena dan kain kebaya serta seprei. Usaha bordir ini tergolong masih relatif kecil dan sedang dalam upaya melakukan pengembangan. Untuk omset yang dihasilkan tiap bulan sekitar 6 jutaan.

Produk yang dihasilkan oleh Bp. Teddy Arnianto, Janggalan sangat berkualitas dan untuk kalangan menengah keatas sehingga pemasarannyapun berdasarkan pesanan saja, yaitu kerjasama dengan butik-butik, pesanan konsumen. Media promosi yang paling diandalkan adalah melalui pameran. Produknya sudah dikemas dalam kemasan yang bagus. Sudah punya merk dagang sendiri bahkan sudah mengajukan hak paten tapi terhambat karena ada produsen lain yang mempunyai nama yang sama dan untuk mengganti nama, pemilik merasa keberatan. Sudah tercatat sebagai pengeksport tapi sampai sekarang belum bisa mengeksport.

Sedangkan usaha bordir milik Ibu Nuranifah produknya hanya terbatas pada mukena dan kerudung. Daerah pemasarannya sudah mencapai kabupaten lain dan model pemasarannya adalah melalui pengecer dan yang paling banyak dilakukan adalah titip barang. Produknya mempunyai kualitas yang cukup baik dan sudah mempunyai kemasan yang lumayan bagus dibandingkan dengan produk serupa dipasaran. Promosi yang diandalkan adalah melalui sesama pembeli.

Ibu Siti Khalimah, Karangmalang menjalankan usaha bordir ini sudah delapan tahunan, dimana produk yang dihasilkan adaalah kebaya, selendang, mukena, jilbab. Omset perbulannya adalah sekitar 6 Jutaaan. Siti Khalimah merintis usahanya dari bawah dimana dia mulai usaha pada tahun 1995 dengan pemberian modal awal berupa satu mesin bordir beserta uang sebesar 100 ribu yang diberikan oleh LP3S. Dimana saat itu Dia mendapat

program pendampingan dari lembaga ini. Siti khalimaah di Koperasi Melati menempati posisi sebagai sekretaris koperasi.

Sedangkan Bp. Sahlan, Kafeksan memiliki saluran distribusi pemasaran produknya meliputi daerah eks. karsidenan Pati ditambah dengan Semarang dan ungaran, dengan pola pemasaran konsinyasi. Produk-produknya mempunyai kualitas yang baik terutama produk andalannya berupa ruku yang merupakan pelopor di Kudus. Produk ruku mempunyai merk dagang EMA yang dikenal baik di daerah pemasarannya, dengan kemasan yang lebih unggul dibandingkan kompetitor sehingga ini sangat membantu dalam hal promosi dan perluasan pasar. biasanya desain produknya mengarang sendiri ditambah kombinasi dari model yang sedang trend. Pengetahuan tentang pasar masih difokuskan pasar yang dikuasainya. hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang diperoleh tentang daerah lain dan belum mempunyai tenaga managerial sendiri.

Usulan kebutuhan adalah adanya bapak asuh untuk mendampingi dalam hal perluasan pasar, menemukan solusi bagaimana produknya menguasai jawa tengah. selama ini pameran yang diikuti di Semarang, Jakarta belum banyak membantu perluasan pasar.

2. Analisis Variabel Pengembangan Industri Kecil Bordir Kudus

a. Pemasaran

1). Pola Pemasaran Industri Kecil Bordir Kudus

(1) Saluran distribusi

TABEL IV. 12
SALURAN DISTRIBUSI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	pengecer -> konsumen	22	57,9
2	langsung ke konsumen	9	23,7
3	lain-lain	7	18,4
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 1

Pada tabel IV.12 terlihat bahwa para pengusaha/pengrajin ternyata sebagian besar melakukan saluran distribusi melalui pengecer ke konsumen yaitu sebanyak 57,9 %. Namun ada juga yang saluran distribusi langsung ke konsumen yaitu sebanyak 23,7 %. Hal ini juga terungkap dari wawancara mendalam dengan informan yang menyatakan bahwa “ *Sebagian besar pola pemasaran saya dengan menerima pesanan dari orang lain, kemudian saya jual ke konsumen. Namun pada saat order sepi, saya menyetorkan produk ke pengecer juga*” (Ibu Sholikhah, Karang Malang).

(2) Jangkauan pemasaran

TABEL IV.13

DAERAH PEMASARAN TERJAUH

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Daerah setempat (lokal)	7	18,4
2	Antar kota (masih dalam satu propinsi)	14	36,8
3	Luar propinsi	11	28,9
4	Luar negeri	6	15,8
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 2

Jangkauan pemasaran produk kecil bordir lebih banyak dipasarkan ke antar kota (masih dalam satu propinsi) yaitu sebanyak 36,8 %. Sedangkan pemasaran ke luar propinsi sebanyak 28,9 %, dan pemasaran produk ke daerah setempat (lokal) sebesar 18,4 %, serta ada juga pemasaran produk ke luar negeri sebesar 15,8 %. Data ini terlihat pada tabel IV.13.

TABEL IV.14

DAERAH PEMASARAN TERBANYAK

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Daerah setempat (lokal)	7	18,4
2	Antar kota (masih dalam satu propinsi)	14	36,8
3	Luar propinsi	11	28,9
4	Luar negeri	6	15,8
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 3

Pemasaran produk industri kecil bordir terbanyak dilakukan di antar kota (masih dalam satu propinsi) yaitu sebesar 36,8 %, sedangkan untuk luar propinsi sebanyak 28,9 %. Untuk pemasaran produk di daerah setempat (lokal) sebanyak 18,4 % dan ke luar negeri sebanyak 15,8 %. Daerah pemasaran terbanyak ini dapat dilihat pada tabel IV.14. Hal ini juga terungkap dari wawancara mendalam

kepada informan, yakni : *“produk saya hanya menerima pesanan. Hal ini karena kami baru dapat menguasai pasar lokal, tepatnya se eks karesidenan Pati, karena terbatasnya informasi / jangkauan pemasaran kami”* (Bp. Sahlan, Kajeksan).

TABEL IV.15
POLA PEMASARAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Titip barang	14	36,8
2	Diambil pedagang yang lebih besar	13	34,2
3	Disetorkan ke pedagang yang lebih besar	2	5,3
4	Di datangi oleh konsumen	7	18,4
5	Lain-lain	2	5,3
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 4

Pola pemasaran produk industri kecil bordir lebih banyak dilakukan dengan cara titip barang (konsinyasi), yaitu sebanyak 36,8 %, sedangkan yang diambil oleh pedagang yang lebih besar sebanyak 34,2 %, namun ada juga produk industri kecil bordir ini didatangi oleh konsumen, yaitu sebanyak 18,4 %. Pola pemasaran hasil produk industri kecil bordir ini terlihat pada tabel IV.15. Dalam wawancara dengan informan diungkapkan *“pemasaran produk kami masih bersifat lokal, dan kebanyakan dagangan kami pasarkan lewat pengecer dengan menyeter tiap satu minggu sekali atau kalau sedang ramai bisa seminggu dua kali”* (Siti Asnaah, Kajeksan).

Sementara itu informan lain menyebutkan "Kami memasarkan produk langsung kepada konsumen yang datang secara khusus ke tempat usaha, namun terkadang ada pembeli dalam jumlah besar untuk dipasarkan kembali ke kota lain"

(Sa'adah, Karangmalang).

(3) Sumber desain

TABEL IV. 16
ASAL / IDE DESAIN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Dari pemesan	6	15,8
2	Meniru desain yang lagi ngetren	10	26,3
3	Mendesain sendiri	22	57,9
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 5

Para pengusaha/pengrajin industri kecil bordir lebih banyak mendesain sendiri hasil produhnya yaitu sebanyak 57,9 %, ada pula desain ini diperoleh dengan meniru desain yang sedang ngetrend, sebanyak 26,3 % dan desain yang berasal dari permintaan pemesan sebesar 15,8 %. Data ini terlihat pada tabel IV.16. Informasi yang diperoleh dalam wawancara secara mendalam dengan informan adalah "untuk desain/motif bordir ini kami desain sendiri dengan mencari inspirasi dari media massa dan melihat desain yang baru trend di supermarket"

(Sukini Nikmah, Karangmalang).

(4) Media promosi

TABEL IV. 17
MEDIA PROMOSI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Pameran	7	18,4
2	Melalui pembeli	20	52,6
3	Sesama pedagang	10	26,3
4	Lain-lain	1	2,6
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 6

Media promosi yang banyak digunakan oleh para pengrajin/pengusaha dalam memasarkan hasil produk industri kecil bordir dalam melalui pembeli, sebanyak 52,6 %. Sedangkan media promosi melalui sesama pedagang sebanyak 26,3 %, dan dengan mengikuti pameran sebanyak 18,4 %. Sementara itu wawancara mendalam menunjukkan ungkapan sebagai berikut : *“bahwa promosi industri kecil bordir dilakukan melalui antar pedagang. Hal ini karena kurangnya informasi tentang pameran. Hanya industri besar yang ditawarkan ikut pameran, sementara tidak pernah sekalipun saya ditawarkan ikut pameran”* (Ibu Sholikhah, Gebog)..

(5) Merk Dagang

TABEL IV. 18
MERK DAGANG

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sudah bermerk	30	78,9
2	Belum bermerk	8	21,1
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 7

Pada tabel IV.18 memperlihatkan bahwa hasil produk industri kecil bordir di Kabupaten Kudus yang sudah bermerek sebanyak 78,9 % dan yang belum memiliki merek sebanyak 21,1 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa produk industri kecil bordir sudah banyak yang menggunakan merek. Dalam wawancara mendalam kada informan terungkap juga bahwa "sebenarnya kami memiliki merk dagang sendiri, namun jarang kami memberi label karena produk yang dipasarkan merupakan pesanan dan diberi label oleh produsen lainnya" (Ibu Sukini Nikmah, Gebog).

(6) Kemasan

TABEL IV.19
KEMASAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sudah mempunyai kemasan	27	71,1
2	Belum mempunyai kemasan	11	28,9
Jumlah		38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 8

Hasil produk industri kecil bordir telah banyak yang mempunyai kemasan yaitu sebesar 71,1 %, sedangkan yang belum menggunakan kemasan sebanyak 28,9 %. Ini terlihat pada tabel IV.19. Seperti yang diungkapkan oleh informan dalam wawancara mendalam bahwa "untuk pemasaran tergantung pada segmen pasar, sehingga kami memiliki beragam variasi. Namun kami masih berharap untuk dapat mengemas produk kotak buatan percetakan dengan bahan dan hasil yang lebih berkualitas" (Sa'adah, Karangmalang).

Namun kami dapatkan pula ungkapan dari informai lainnya bahwa *“sebenarnya kami telah memiliki kemasan, namun hanya kami bungkus dengan plastik, karena permintaan konsumen”* (Sholikah, Gebog).

(7) Keindahan kemasan

TABEL IV. 20
KEINDAHAN KEMASAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Masih lebih jelek	4	10,5
2	Biasa saja	11	28,9
3	Lumayan bagus	10	26,3
4	Bagus sekali	27	5,3
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 9

Pada tabel IV.20 menunjukkan bahwa 28,9 % para pengrajin/pengusaha industri kecil bordir menganggap bahwa kemasan hasil produknya tampak biasa saja. Sedangkan 26,3 % menganggap kemasan hasil produknya lumayan bagus. Namun ada juga yang menganggap kemasannya masih lebih jelek yaitu sebanyak 10,5 %.

Hasil rekap variabel menunjukkan bahwa persentase pemasaran yang sudah baik cukup besar (74 %). Hanya 26 % yang kurang. Dalam wawancara mendalam dengan informan terungkap bahwa *“kemasan yang kami miliki biasa-biasa saja, inipun jarang kami gunakan karena pemesan lebih banyak menghendaki untuk dibungkus dengan plastik saja, karena produk yang dihasilkan akan diberi label oleh produsen lain untuk dipasarkan”* (Ibu Sukini Nikmah, Gebog). Namun kami jumpai pula ungkapan dari informan lain bahwa *“kami mengharapkan dapat mengemas produk kami menggunakan kotak buatan percetakan dengan bakan dan*

hasil yang lebih berkualitas, karena kualitas produk kami selama ini terasa masih kurang bagus" (Sa'adah, Karangmalang).

2). Keuangan

(1) Besar modal awal

TABEL IV. 21
BESAR MODAL AWAL

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Menurun	0	0
2	Tetap	1	2,6
3	Meningkat lumayan	25	65,8
4	Jauh lebih banyak	12	31,6
Jumlah		38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 10

Bila dibandingkan dengan saat memulai usaha dulu, para pengrajin/pengusaha menyatakan bahwa modal usaha yang dimiliki sekarang meningkat lumayan sebanyak 65,8 %, sedangkan yang menyatakan meningkat jauh lebih banyak adalah 31,6 % dan yang menyatakan modalnya tetap sebanyak 2,6 %. Besarnya modal ini dapat terlihat pada tabel IV.21. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan informan "sampai saat ini modal yang kami miliki telah jauh berkembang dibandingkan pada saat awal berdiri. Hingga saat ini omset kami telah mencapai Rp. 30.000.000,- per bulan" (Sa'adah, Karangmalang). Dari informan lain kami peroleh bahwa "modal usaha sampai saat ini lumayan meningkat" (Ibu Sukini Nikmah, Gebog).

(2) Persentase Modal sendiri

TABEL IV. 22
MODAL DIRI SENDIRI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	50 %	7	18,4
2	70 %	1	2,6
3	75 %	1	2,6
4	80 %	4	10,5
5	90 %	4	10,5
6	100 %	19	50
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 11

Pada tabel IV.22 memperlihatkan perbandingan modal diri sendiri yang dijalankan untuk kegiatan usaha ini sebesar 100 % sebanyak 50 %, sedangkan modal sendiri sebesar 50 % sebanyak 18,4 %. Perbandingan modal sendiri sebesar 80 % dan 90 % masing-masing sebanyak 10,5 % serta modal sendiri sebesar 70 % dan 75 % masing-masing sebesar 2,6 %. Dalam wawancara secara mendalam dengan informan kunci terungkap bahwa *“modal yang kami miliki sekarang 100 % modal sendiri dan tidak pernah mengajukan atau menerima bantuan dari pihak lain baik bank maupun pemerintah, karena kami takut jika nantinya tidak bisa membayar”* (Bp. Miftakhul Rohmat, Pedurenan). Sedangkan dalam wawancara kami dengan Bp. Sahlan terungkap *“sejauh ini struktur modal yang kami miliki adalah 80 % modal sendiri dan 20 % modal pinjaman yang berupa bahan baku dari penyuplai”*.

(3) Modal pinjaman

TABEL IV. 23
MODAL PINJAMAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	0 %	19	50
2	10 %	4	10,5
3	20 %	4	10,5
4	25 %	1	2,6
5	30 %	1	2,6
6	50 %	7	18,4
7	100 %	2	5,3
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 12

Perbandingan modal pinjaman untuk melakukan usaha industri kecil bordir tampak pada tabel IV.23, yang menunjukkan bahwa yang menyatakan tanpa menggunakan modal pinjaman sebanyak 50 %, sedangkan yang menggunakan modal pinjaman sebesar 50 % sebanyak 18,4 %. Penggunaan modal pinjaman sebesar 10 % dan 20 % masing-masing sebanyak 10,5 % serta modal pinjaman sebesar 25 % dan 30 % masing-masing sebanyak 2,6 %. Ada juga yang menyatakan modal pinjaman sebesar 100 % yaitu sebanyak 5,3 %. Dalam wawancara dengan informan diperoleh ungkapan bahwa "sampai saat ini modal usaha yang kami miliki sebesar 50 % miliki sendiri, karena sejak awal berdirinya 100 % pinjaman ke bank dan hampir tahun kami mengambil kredit ke bank" (Ibu Nuraniyah, Kajeksan). Sementara keterangan dari informan lain menyebutkan "modal yang kami miliki sekarang 100 % milik sendiri, karena kami takut akan bunga pinjaman yang tinggi sehingga kami tidak meminjam ke bank karena takut tidak dapat membayarnya" (Siti Khalimah, Karangmalang).

(4) Tambahan modal

TABEL IV. 24
TAMBAHAN MODAL

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat membutuhkan	11	28,9
2	Memerlukan, tetapi tidak harus	16	42,1
3	Tidak, kecuali saat-saat tertentu	5	13,2
4	Sama sekali tidak	6	15,8
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 13

Tabal IV.24 menunjukkan bahwa 42,1 % pengusaha/pengrajin menyatakan memerlukan tambahan modal, tetapi tidak harus. Yang sangat membutuhkan tambahan modal sebanyak 28,9 %, tidak membutuhkan tambahan modal, kecuali pada saat-saat tertentu sebanyak 13,2 % dan yang sama sekali tidak membutuhkan tambahan modal sebanyak 15,8 %. Informasi yang kami dapatkan dalam wawancara mengungkapkan *"kami membutuhkan modal pada saat order sedang ramai, namun itupun jika tambahan modal yang kami terima juga tidak memberatkan"* (Sholikhah, Karangmalang). Namun adapula informan yang mengungkapkan *"pada saat ini kami tidak membutuhkan modal, karena pesanan belum banyak"* (Sukini Nikmah, Karangmalang).

(5) Modal untuk investasi

TABEL IV. 25
MODAL UNTUK INVESTASI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat membutuhkan	10	26,3
2	Memerlukan, tetapi tidak harus	14	36,8
3	Tidak, kecuali saat-saat tertentu	9	23,7
4	Sama sekali tidak	5	13,2
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 14

Untuk pengembangan usaha 36, % pengusaha/pengrajin menyatakan memerlukan tetapi tidak harus. Sedangkan 26,3 % menyatakan sangat membutuhkan. Pengusaha/pengrajin yang tidak membutuhkan kecuali saat-saat tertentu sebanyak 23,7 % dan yang sama sekali tidak membutuhkan sebanyak 13,2 %. Data ini tampak pada tabel IV.25. Terungkap dalam wawancara secara mendalam dengan informan bahwa "sebenarnya kami masih membutuhkan modal kerja untuk pengembangan usaha dan perluasan jaringan pemasaran. Sebenarnya mudah untuk mendapatkan pinjaman tapi bunga yang ditawarkan terlalu tinggi dan kami menemui kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank" (Siti Khalimah, Karangmalang). Adapula ungkapan yang disampaikan oleh informan bahwa "kebutuhan modal kami masih fleksibel, artinya kalau pesanan sedang ramai perlu tambahan modal tapi kalau sepi tidak" (Teddy Arnianto, Janggalan).

(6) Kemudahan akses terhadap sumber modal

TABEL IV. 26
KEMUDAHAN AKSES TERHADAP SUMBER MODAL

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sulit sekali	4	10,5
2	Agak sulit	12	31,6
3	Cukup mudah	18	47,4
4	Sangat mudah	3	7,9
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 15

Tabel IV.26 menunjukkan bahwa selama ini 47,4 % para pengusaha/pengrajin merasa cukup mudah untuk mengakses modal, sedangkan 31,6 % merasa agak sulit dan 10,5 % menyatakan sulit sekali. Ada pula yang menyatakan sangat mudah mengakses modal yaitu sebanyak 7,9 %.

Sebanyak 47, 4% dari rekap variabel menunjukkan bahwa pengrajin merasa keuangannya tidak mencukupi untuk pengembangan usaha. Dalam wawancara dengan informan kami peroleh ungkapan bahwa “ *sebenarnya mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank, namun bunga yang mereka tawarkan terlalu tinggi bagi kami, dan kami menemui kendala dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan*” (Siti Khalimah, Karangmalang). Informan lain mengungkapkan “*kesulitan kami dalam mengajukan pinjaman ke bank adalah harus mencantumkan laporan keuangan, sedangkan selama ini keuangan usaha kami masih bercampur dengan uang keluarga*” (Teddy Arnianto, Janggalan).

3). Sumberdaya Manusia
(1) Ketercukupan pegawai

TABEL IV. 27

KETERCUKUPAN PEGAWAI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat kurang	3	7,9
2	Kurang	12	31,6
3	Mencukupi	21	55,3
4	Sangat mencukupi	0	94,7
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 16

Sampai dengan saat ini 94,7 % pengusaha/pengrajin merasa jumlah pegawai yang dimiliki sangat mencukupi. Merasa mencukupi sebanyak 55,3 %. Sedangkan 31,6 % pengusaha/pengrajin menyatakan kurang. Dan 7,9 % menyatakan kurang. Data ini terlihat pada tabel IV.27. Dalam wawancara secara mendalam dengan informan terungkap "pegawai yang saya miliki sudah mencukupi dan kualitasnya cukup bagus sehingga saya tidak menambah pegawai, sekarang pekerja yang saya miliki sebanyak 50 pekerja" (Bp. Muhammad Ansori, Pedurenan). Sedangkan dalam wawancara dengan informan lainnya kami peroleh bahwa "sekarang ini ada 25 orang pekerja, baik yang ada dirumah maupun di rumah masing-masing. Namun itu belum mencukupi, karena kami belum punya pegawai yang mengurus masalah managerial" (Bp. Miftakhul Rohmat, Pedurenan).

(2) Kualitas pegawai

TABEL IV. 28
KUALITAS PEGAWAI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat memadai	3	7,9
2	Cukup memadai	25	65,8
3	Kurang memadai	10	26,3
4	Sangat kurang memadai	0	0
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 17

Pada tabel IV.28 menunjukkan bahwa pegawai yang dimiliki oleh pengusaha/pengrajin kualitasnya cukup memadai sebanyak 65,8 %. Sebanyak 26,3 % menyatakan kualitasnya kurang memadai, dan 7,9 % menyatakan kualitasnya sangat memadai. Terungkap dalam wawancara bahwa *“Kualitas pegawai yang kami miliki cukup baik dan memadai meskipun untuk administrasinya harus kami tangani sendiri”* (Ibu Sukini Nikmah, Karangmalang). Informan lain mengungkapkan *“kami memiliki 40 tenaga kerja teknis yang mempunyai ketrampilan cukup baik di bidangnya masing-masing”* (Bp. Ainudin, Pedurenan).

(3) Ketrampilan pegawai

TABEL IV.29
KETRAMPILOAN PEGAWAI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat memadai	6	15,8
2	Cukup memadai	28	73,3
3	Kurang memadai	4	10,5
4	Sangat kurang memadai	0	0
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 18

Ketrampilan para karyawan sebagian besar cukup memadai, yaitu sebanyak 73,3 %, 15,8 % ketrampilan karyawan sangat memadai dan karyawan yang ketrampilannya kurang memadai sebanyak 10, 5 %. Data ini ditunjukkan pada tabel IV.29. Dalam wawancara dengan informan kami peroleh ungkapan "pegawai yang bekerja pada kami kualitasnya cukup memadai. Kami tidak pernah melatih pegawai secara khusus karena kami hanya menerima pegawai yang sudah bisa membordir dan untuk selanjutnya akan dilatih sambil bekerja" (Ibu Nurarifah, Kajeksan). Informan lain mengungkapkan "saat ini cukup sulit untuk mendapatkan pegawai yang terampil dan harus melatih dari nol terutama industri kecil seperti kami karena kebanyakan bekerja di industri yang sudah besar" (Siti Khalimah, Karangmalang).

(4) Perencanaan kebutuhan pegawai

TABEL IV. 30

PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ada rencana	25	65,8
2	Tidak ada rencana	13	34,2
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 19

Pada tabel IV.30 memperlihatkan bahwa para pengusaha/pengrajin memiliki rencana kebutuhan tenaga untuk pengembangan usaha sebanyak 65,8 %, sedangkan 34,2 % para pengusaha/pengrajin menyatakan tidak ada rencana kebutuhan pegawai. Dalam wawancara informan mengungkapkan bahwa *“seiring dengan bertambahnya permintaan pasar sehingga mau tidak mau ada rencana penambahan pegawai lagi, walaupun sampai saat ini belum terpenuhi karena belum ada mesinnya”* (Siti Asnaah, Kajeksan). Sementara itu informan lain mengungkapkan *“kami tidak memaksakan untuk menambah pegawai apabila tidak kami peroleh tenaga terampil seperti apa yang kami inginkan”* (Sa’adah, Karangmalang).

(5) Kejelasan pembagian pekerjaan

TABEL IV. 31

KEJELASAN PEMBAGIAN PEKERJAAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat kurang jelas	0	0
2	Kurang jelas	4	10,5
3	Cukup jelas	16	42,1
4	Sangat jelas	18	47,4
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 20

Pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh para pengrajin/pengusaha pada umumnya sangat jelas, yaitu sebanyak 47,4 %, dan pembagian pekerjaan yang cukup jelas sebanyak 42,1 %. Sedangkan pembagian pekerjaan yang masih kurang jelas sebanyak 10,5 %. Data ini tercermin pada tabel IV.31. Informasi yang kami peroleh dari informan mengungkapkan bahwa "sudah ada pembagian tugas yang jelas pada masing-masing pegawai kami. Ada yang hanya mengerjakan bordir JUKI, bordir manual dan bagian obrass" (Sukini Nikmah, Karangmalang). Sementara itu informan lain menyampaikan "untuk industri kecil bordir pembagian kerja tidak terlalu rumit sehingga tugas-tugas yang kami berikan kepada para pegawai cukup baik mereka laksanakan" (Siti Khalimah, Karangmalang).

(6) Penghargaan khusus

TABEL IV. 32
PENGHARGAAN KHUSUS

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ada	29	76,3
2	Tidak ada	9	23,7
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 21

Pada tabel IV.32 memperlihatkan bahwa ada semacam pemberian penghargaan khusus yang diberikan pada pegawai yang berprestasi yaitu sebanyak 76,3 % dan 23,7 % menyatakan tidak ada. Dalam wawancara dengan informan kami peroleh ungkapan *“kami memberikan penghargaan kepada pegawai berupa uang apabila mereka dapat menghasilkan bordiran bagus sesuai dengan target”* (Siti Khalimah, Karangmalang). Diperoleh ungkapan dari informan lain *“kami memberi bonus berupa uang sebagai usaha untuk mempertahankan pegawai agar tidak pindah ke tempat lain”* (Siti Asnaah, Kajeksan).

(7) Pelatihan kemampuan

TABEL IV.33
PELATIHAN KEMAMPUAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ada	13	34,2
2	Tidak ada	25	65,8
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 22

Ditunjukkan dalam tabel IV.33 bahwa tidak ada program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan yang dilakukan oleh para pengusaha/pengrajin yaitu sebanyak 65,8 % dan 34,2 % menyatakan ada program untuk peningkatan kemampuan karyawan.

Dari rekap variabel diketahui bahwa mereka yang merasakan keterbatasan sumberdaya manusia sebesar 47,4 %. Informasi yang kami peroleh dalam wawancara dengan informan bahwa "kami tidak pernah melatih pegawai secara khusus karena kami hanya menerima pegawai yang sudah bisa membordir, untuk seterusnya akan dilatih sambil bekerja" (Ibu Nuraniyah, Kajeksan). Sementara itu informan lain mengungkapkan bahwa "pelatihan biasanya kami lakukan di awal mereka bekerja saja, setelah mereka mahir cukup dengan diawasi" (Siti Asna'ah, Kajeksan).

4). Bahan Baku

(1) Kemudahan mendapat bahan baku

TABEL IV. 34

KEMUDAHAN MENDAPAT BAHAN BAKU

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat mudah	16	42,1
2	Cukup mudah	18	47,4
3	Agak sulit	4	10,5
4	Sulit sekali	0	0
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 23

Dari tabel IV.34 diketahui bahwa 47,4 % para pengusaha/pengrajin merasa cukup mudah untuk mendapatkan bahan baku, sedangkan 42,1 % menyatakan sangat mudah memperoleh bahan baku dan 10,5 % pengusaha/pengrajin menyatakan

agak sulit mendapatkan bahan baku. Dalam wawancara dengan informan diungkapkan *“bahan baku diperoleh cukup mudah di Kota Kudus dan sekitar industri kecil bordir ini”* (Bp. Teddy Arnianto). Sementara itu informan lain mengungkapkan *“pengadaan bahan baku untuk keperluan produksi cukup mudah, karena sudah ada penyuplai tetap yang didatangkan dari Semarang dan Bandung dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang bagus bahkan kadang mendapat pinjaman berupa bahan baku dari penyuplai”* (Ainudin, Pedurenan).

(2) Keterjangkauan harga bahan baku

TABEL IV. 35
KETERJANGKAUAN HARGA BAHAN BAKU

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat terjangkau	16	42,1
2	Cukup terjangkau	18	47,4
3	Agak mahal	4	42,1
4	Sangat mahal	0	0
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 24

Bagi para pengusaha/pengrajin 47,4 % merasa bahwa harga bahan baku pada saat ini cukup terjangkau. Sedangkan yang merasa harga bahan baku sangat terjangkau dan merasa agak mahal masing-masing sebanyak 42,1 %. Data ini diketahui dari tabel IV.35. Diperoleh informasi dalam wawancara dengan informan bahwa *“harga bahan baku bordir relatif cukup terjangkau, jika ada kenaikan harga bahan baku, kami tinggal*

(3) Kualitas bahan baku

TABEL IV. 36

KUALITAS BAHAN BAKU

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat bagus	16	42,1
2	Bagus	18	47,4
3	Kurang bagus	4	10,5
4	Jelek	0	0
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 25

Tabel IV.36 memperlihatkan bahwa kualitas bahan baku yang beredar pada saat ini 47,4 % kualitasnya bagus, sedangkan kualitas sangat bagus sebanyak 42,1 %, dan kualitas bahan baku yang kurang bagus sebanyak 10,5 %. Informan yang kami wawancarai mengungkapkan bahwa "kualitas bahan baku yang kami peroleh cukup bagus. Di Kota Kudus dapat diperoleh bahan baku dengan beragam kualitas sesuai dengan kebutuhan. Kami merasa standar kualitas bahan baku untuk produk kami sudah cukup bagus" (Sa'adah, Karangmalang). Informan lain mengungkapkan "bahan baku dengan jenis-jenis tertentu dengan kualitas yang bagus agak sulit didapatkan" (Bp. Muhammad Ansori).

menyesuikannya dengan harga jual" (Sukini Nikmah, Karangmalang). Informan lain menyampaikan "mahal dan tidaknya harga bahan baku tergantung dari jenis atau merk bahan, jika harga bahan baku naik, kami juga menaikkan harga jual" (Solikhah, Karangmalang).

(4) Sistem pengadaan bahan baku

TABEL IV.37
SISTEM PENGADAAN BAHAN BAKU

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Belanja secara rutin	16	42,1
2	Belanja relative rutin	18	47,4
3	Biasanya rutin, tetapi kadang berdasarkan pesanan	4	10,5
4	Hanya berdasarkan pesanan	0	0
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 26

Sistem pengadaan bahan baku yang banyak dilakukan oleh para pengusaha/pengrajin industri kecil bordir adalah dengan belanja relatif rutin yaitu sebanyak 47,4 %, dengan belanja rutin sebanyak 42,1 % dan yang biasanya rutin, tetapi kadang berdasarkan pesanan sebanyak 10.5 %. Data ini tercermin pada tabel IV.37.

Dari rekap variabel tercatat hanya 10, 5 % yang merasakan kesulitan dengan bahan baku. Dalam pengadaan bahan baku dari wawancara dengan informan mengungkapkan *"kami melakukan belanja rutin 2-3 bulan sekali tapi juga tergantung pesanan"* (Teddy Arnianto, Janggalan). Sementara informan lain mengungkapkan *"pengadaan bahan baku kami lakukan 10 hari sekali dari Semarang dan Tasikmalaya"* (Bp. Sahlan, Kajeksan).

5). Teknologi

(1) Jumlah peralatan

TABEL IV. 38
JUMLAH PERALATAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sampai dengan 30 unit	29	76,3
2	31 s/d 60 unit	5	13,2
3	61 s/d 90 unit	3	7,9
4	91 unit ata lebih	1	2,6
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 27

Jumlah peralatan yang dimiliki oleh para pengrajin/pengusaha sebagian besar berjumlah sampai dengan 30 unit yaitu sebesar 76,3 %, yang memiliki peralatan 31 s/d 60 unit sebanyak 13,2 % dan pengusaha/pengrajin yang memiliki peralatan sebanyak 61 s/d 90 unit sebanyak 7,9 %, ada pula yang memiliki peralatan lebih dari 91 unit yaitu sebanyak 2,6 %. Ini ditunjukkan pada tabel IV.38. Dalam wawancara dengan informan diungkapkan bahwa "mesin bordir yang kami miliki sekarang sudah mencukupi" (Ibu. Nuraniyah, Kajelesan). Sementara itu informan lain mengungkapkan "jenis dan alat produksi yang kami miliki adalah mesin manual yang secara kualitas lebih baik, makanya mampu bertahan sampai sekarang. Namun untuk mengajar jumlah produksi, bukan kualitas kami merasa masih membutuhkan mesin JUKI untuk memenuhi permintaan pasar kalangan menengah ke bawah" (Siti Khalimah, Karangmalang).

(2) Kememadain peralatan

TABEL IV. 39.

KEMEMADAIAN PERALATAN

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat memadai	5	13,2
2	Cukup memadai	23	60,5
3	Kurang memadai	8	21,1
4	Sangat kurang memadai	1	2,6
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 28

Peralatan yang dimiliki oleh para pengusaha/pengrajin pada umumnya cukup memadai, yaitu sebanyak 60,5 %. Sedangkan 21,1 % menyatakan peralatan yang dimiliki kurang memadai, dan 13,2 % menyatakan peralatan yang dimiliki sangat memadai, serta yang menyatakan peralatan kurang memadai sebanyak 2,6 %. Data ini terlihat pada tabel IV.39. Dalam wawancara dengan informan kami peroleh ungkapan bahwa *“sebagian besar alat bordir yang kami miliki adalah mesin bordir manual karena mampu menghasilkan bordir dengan kualitas lebih bagus. Peralatan bordir ini sudah cukup memadai dan jumlahnya sudah mencukupi jika pesanan tidak terlalu ramai”* (Muhammad Ansori, Pedurenan). Sementara itu informan lain mengungkapkan *“alat bordir yang kami miliki sekarang masih kurang memadai, meskipun kami memiliki mesin JUKI yang kerjanya lebih cepat, namun kami masih mengandalkan kualitas, sehingga kami gunakan mesin bordir manual”* (Sa’adah, Karangmalang).

(3) Penguasaan alat baru

TABEL IV. 40.

PENGUASAAN ALAT BARU

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat menguasai	3	7,9
2	Cukup dapat menguasai	28	73,7
3	Kurang menguasai	6	15,8
4	Sangat kurang menguasai	1	2,6
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 29

Dari tabel IV.40 memperlihatkan bahwa sebagian besar karyawan cukup dapat menguasai peralatan baru yang beredar yaitu sebanyak 73,3 %. Sedangkan 15,8 % karyawan masih kurang menguasai, 7,9 % karyawan menguasai, masih ada karyawan yang sangat kurang menguasai sebanyak 2,6 %. Dari rekap variabel tercatat 52,6 % kurang menguasai teknologi di bidang bordir. Informasi yang diperoleh dalam wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa "untuk mesin bordir komputer masih mengalami kendala untuk menguasainya" (Siti Asnaah, Kajeksan). Selain itu informan lain mengungkapkan "pada umumnya pegawai kami sudah menguasai dengan baik terhadap mesin bordir JUKI" (Bp. Miftakhuil Rohmat, Pedurenan).

(4) Pengadaan alat baru

TABEL IV. 41
PENGADAAN ALAT BARU

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Ada	24	63,2
2	Tidak ada	13	34,2
	Jumlah	38	100

Sumber : diolah dari pertanyaan nomor 31

Para penguaha/pengrajin industri kecil bordir sebagian besar memiliki rencana untuk pengadaan alat baru, yaitu sebesar 63,2 %, sedangkan 34,2 % menyatakan tidak ada pengadaan alat baru. Data ini tercermin pada tabel IV.41. Dalam wawancara secara mendalam dengan informan terungkap bahwa *“guna memenuhi permintaan pasar terutama kalangan menengah kebawah kami berharap untuk bisa menambah mesin JUKI”* (Siti Khalimah, Karangmalang). Sementara itu informan mengungkapkan *“tidak perlu menambah mesin baru karena selama ini masih mampu untuk memenuhi pesanan”* (Ibu Nuranifah, Kajeksan).

3. Analisis Kebutuhan Dampingan Industri Kecil Bordir

Dibawah ini merupakan hasil kulitatif dari pengrajin yang merasakan pola pendampingan dari instansi sbb:

1). Nama Pengrajin : Ibu Sukini Nikmah

Kebutuhan Dampungan :

Kebutuhan dampungan ini hanya dirasakan oleh pengrajin yang telah mendapatkan pola pendampungan dari Diperindag Kudus, biasanya mereka tergabung dalam kelompok yang anggotanya minimal 15 pengrajin. Kelompok ini dirintis oleh sebuah LM Pengembang masyarakat (LP3ES) sekitar tahun 1989. Sedangkan pengrajin yang tidak ikut kelompok, secara otomatis mereka tidak merasakan pola pendampungan dari pemerintah. Pengrajin ini biasanya termasuk industri yang kecil. Mereka tidak bergabung dengan kelompok karena tidak dapat perhatian yang adil dari instansi. Hanya pengrajin yang besar yang mendapatkan pelayanan yang maksimal dan selalu diprioritaskan. Tidak ada pemerataan antara anggota kelompok sehingga pengrajin yang besar saja yang menikmati pola pendampungan dari pemerintah.

Industri yang dimiliki oleh Ibu Sukini Nikmah sudah berjalan selama 12 tahun dan merupakan salah satu anggota kelompok binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kudus. Kelompok binaan ini memiliki 15 anggota industri bordir di Desa Karang Malang. Industri bordir "Dewi Kunti" ini mempekerjakan sebanyak 12 tenaga kerja. Industri bordir ini memproduksi busana muslim, kerudung dan kebaya dengan omset per bulan sebesar Rp 800.000,-. Sebagai anggota kelompok "Teratai Jaya", Ibu Sukini Nikmah banyak mengikuti pertemuan yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Dengan adanya pertemuan ini, Ibu Sukini Nikmah mendapatkan banyak informasi tentang perkembangan bordir baik pameran maupun permodalan.

Kenyataan Pola Dampingan :

Pemberdayaan Masyarakat Bordir

1. Pelibatan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah.

Pengrajin diundang untuk menghadiri pertemuan kelompok tiap 1 bulan sekali yang membahas sosialisasi pameran, permodalan dan lain-lain.

2. Pembelajaran dan pemampuan masyarakat dalam berbagai aspek

Instansi pendamping pernah memberikan pelatihan sosialisasi bagaimana persyaratan peminjaman modal.

3. Kelangsungan usaha

Pengrajin masih dapat bertahan, meskipun tidak ada tambahan modal. Hal ini karena modal usaha yang dipakai adalah modal sendiri. Pengrajin takut untuk mengambil pinjaman karena tanggungan utang. Ada proses regenerasi yaitu anak dari Ibu Sukuni Nikmah yang membantu manajemen industri bordir.

4. Peran pemerintah

Pengrajin masih membutuhkan pendampingan dari aspek peningkatan kualitas, kuantitas produk dan pengarahan berupa pelatihan-pelatihan yang terpadu.

Harapan Pola Dampingan :

1. Melengkapi kelompok dengan koperasi yang lebih lengkap menyediakan bahan baku bordir sehingga bahan baku mudah didapat dan anggota juga mendapatkan tambahan pendapatan.
2. Untuk pinjaman modal usaha diharapkan tidak memberatkan dan dengan bunga yang rendah, mungkin sampai 0 %.

3. Pemerintah juga diharap memfasilitasi pengadaan majalah desain bordir yang

harganya sangat mahal bagi pengrajin untuk menambah pengetahuan desain bordir yang baru nge'trend'.

4. memberikan kesempatan kepada industri yang kecil untuk mengikuti pameran.

2). Nama

: Ibu Sa'adah

(1) Pelibatan dalam Perumusan Pendampingan

Selama dalam menjalankan usahanya, Ibu Sa'adah merasa sudah sering diminta untuk memberikan saran bagi pendampingan dari pemerintah. Namun, hingga saat ini, sangat disayangkan karena menurutnya beliau tidak melihat suatu tindak lanjut dari saran dan usulan yang diberikannya. Beliau pernah meminta untuk bantuan peralatan dan ini diberikan oleh LP3ES. Beliau dan kelompok usahanya juga pernah mendapat bantuan dana dari Depertindag sebesar masing-masing Rp2.500.0000,00. Namun selanjutnya hingga saat ini, tidak ada lagi bantuan yang diberikan secara nyata dari sumbangan saran yang diberikannya.

(2) Pembelajaran dan Pemampuan Masyarakat Dalam Berbagai Aspek.

Menurut Ibu Sa'adah selama ini pemerintah sudah banyak memberikan pelatihan kepada para pengrajin Antara lain, adanya pelatihan pemasaran, manajemen dan desain. Walau dalam hal ini, Ibu Sa'adah tidak cukup aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut karena keterbatasan waktu dan tenaga yang dimilikinya. Namun pemerintah pun juga pernah memberi pelatihan pengembangan modal usaha. Namun dengan jumlah tenaga terampil yng terbatas, walau mendapat tambahan modal beliau kesulitan untuk mengembangkan produksinya. Pemerintah menurutnya tidak pernah

memberikan semacam pelatihan teknologi bagi para pegawaiya. Beliau mengharapkan agar pemerintah dapat memberikan pelatihan desain motif bagi usaha bordirnya.

(3) Kelangsungan Usaha.

Pangsa pasar Ibu Sa'adah sungguh tinggi. Namun karena sulitnya untuk mencari tenaga terampil beliau enggan untuk mengembangkan usahanya. Dengan omset yang telah dicapainya, Ibu Sa'adah merasa cukup banyak dengan hasil usahanya tersebut. Ini dapat dilihat dari keengganannya untuk mencari tambahan modal usaha, upayanya mengatasi kendala kurangnya tenaga kerja, atau melakukan pengembangan usaha semacam pelatihan-pelatihan. Beliau juga saat ini belum melakukan regenerasi usaha karena beliau putra-putrinya yang dapat diharapkan masih muda.

(4) Peran Pemerintah.

Dalam menjalankan usahanya, Ibu Sa'adah menilai masih membutuhkan pendampingan dari pemerintah. Misalnya dalam bantuan permodalan, promosi dan ketrampilan tertentu. Namun kesemua dampingan yang ada dirasakan kurang maksimal. Sehingga selama ini, usahanya keberhasilannya tidak banyak ditentukan oleh bantuan dari pemerintah. Usahanya cukup berkembang dan dalam hal ini cukup mandiri dari ketergantungan dampingan pemerintah.

3). Nama : Bapak Miftakhul Rohmat

Identifikasi Kebutuhan Dampungan (Harapan dan kenyataan) :

(1) Pelibatan dalam perumusan kebijakan pemerintah

Responden belum pernah dilibatkan dalam merumuskan kegiatan pendampungan ataupun diminta masukan oleh instansi pendamping. Dan juga -belum pernah mendapat program pendampungan secara pribadi tapi kalau secara kelompok sudah pernah dan bantuan pendampungan yang diperoleh kelompoknya adalah bantuan mesin bergulir. Responden ingin mendapatkan program pendampungan yang ditunjukkan secara pribadi.

(2) Pembelajaran dan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek

Responden belum pernah mendapatkan program pendampingan tapi ingin mendapatkan bantuan terutama dalam bentuk uang karena sifatnya fleksibel. Selain bantuan dana, responden mengharapkan diadakan program bapak asuh yang dapat membantu pengusaha kecil terutama dalam memasarkan produk agar pemasaran produknya dapat lebih luas dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya.

(3) Kelangsungan usaha

Usahanya saat ini berkembang dengan baik tapi belum pernah mengembangkan usaha secara besar-besaran karena tidak punya modal yang besar dan tidak berusaha mencari pinjaman modal ke bank. Model usahanya Barter yaitu ia membawa produknya dan ditukar dengan bahan baku. Responden ingin menjadikan usahanya lebih besar agar dapat diteruskan oleh anak-anaknya.

(4) Peran pemerintah

Responden sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Dengan program dampingan, ia berharap dapat lebih mengembangkan usahanya. Responden akan tetap bisa menjalankan usahanya walaupun tidak mendapat dampingan dari pemerintah tapi dengan dampingan dari pemerintah usahanya akan lebih mantap, mandiri.

4). Nama : Sri Amini

Sri Amini sudah memulai usaha kerajinan bordir ini kurang lebih sejak 20 tahun silam. Usaha bordirnya paling besar di Desa Karangmalang ini. SRI REJEKI adalah industri yang paling maju/besar di Desa Karangmalang untuk mesin manual sehingga pangsa pasar SRI REJEKI sudah keluar propinsi di Desa Karangmalang. Struktur modal yang dimiliki SRI REJEKI ini adalah 50% modal sendiri dan 50 % modal pinjaman. Sampai saat ini Dia memimpin koperasi Melati dengan 15 orang anggota. Tetapi kelompok ini belum bekerjasama untuk masalah pemasaran.

(1). Pelibatan perumusan kebijakan Pemerintahan

- ☐ Sudah dilibatkan dalam pembuatan/perumusan kebijakan. Hal ini dilakukan dengan mendatangi para pengerajin dan menanyakan kebutuhan baik berupa peralatan maupun modal yang dibutuhkan. Sri Amini adalah ketua kelompok pengerajin Bordir di Desa Karangmalang yang diberi nama “Koperasi Melati” sehingga secara otomatis sering dihubungi oleh dinas yang terkait.
- ☐ Intensitas pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan olehnya masih sangat kurang. Mereka hanya datang kalau ingin membutuhkan data saja

dari para pengrajin. Padahal ada para pengrajin mengharapkan pendampingan yang intensif dari pemerintah terutama buat pengrajin yang kecil karena mereka masih membutuhkan pembinaan secara teknis dan non teknis. Pendampingan itu sangat dibutuhkan bagi para pengrajin yang masih merintis dari bawah, mereka membutuhkan dukungan baik secara moril maupun materiel dari pemerintah yang terkait.

- Intensitas untuk memberikan masukan/meminta pendampingancukup sering dilakukan terutama oleh para pengrajin yang masih kecil. Tetapi selama ini masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, sehingga hal ini cukup menghambat para pengrajin untuk mengembangkan usahanya. Campur tangan pihak luar ternyata mengganggu hubungan antara pedagang dengan pemerintah, harapan dari para pengrajin agar jangan mencampur adukkan dengan hal luar yaang tidak ada kaitannya dengan kerajinan bordir, karena hal ini mengganggu kelangsungan usaha dari para pengrajin.

(2). Pembelajaran dan pendampingan masyarakat dalam berbagai aspek

- Peran pemerintah dalam mencari modal cukup dibutuhkan oleh para pengrajin yang ingin mengembangkan usahanya. Selama ini sudah cukup banyak bank yang menawarkan pinjaman tetapi paraa pengrajin enggan untuk meminjam dikarenakan bunga bank yang memberatkan bagi mereka, tidak mempunyai jaminan untuk melakukan pinjaman, kekhawatiran tidak bisa membayar cicilan apabila kondisi pasar sedang sepi, sehingga sebagian besar pedagang sudah merasa cukup dengan modal yang dimilikinya. Karena saat ini apabila ingin menambah peralatan mereka kesulitan mencari tenaga kerja yang

mumpuni. Kengganannya untuk melakukan pinjaman inilah yang membuat usaha mereka tidak dapat berkembang secara pesat dan mampu memenuhi permintaan pasar. Mereka takut untuk mengambil resiko.

- Untuk pembelajaran masalah teknologi, masih cukup kurang yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk teknologi yang canggih seperti Mesin bordir komputer, para pengrajin berharap ada pelatihan dari pemerintah secara penuh dan tidak setengah-setengah. Dimana selama ini pemerintah apabila melakukan pelatihan/pembinaan hanya bersifat setengah-setengah.
- Pembelajaran masalah pemasaran dirasa sangat kurang sekali, sehingga banyak pedagang yang jangkauan jualnya hanya bersifat lokal. Para pengrajin masih membutuhkan bimbingan dari pemerintah secara serius, karena selama ini pelatihan pemasaran dilakukan secara parsial sehingga pemahaman dan kemampuan dari para pengrajin sangat rendah sekali tentang masalah pemasaran. Dan biasanya pemasaran hanya diketahui dengan baik oleh pedagang-pedagang besar/mapan.

(3). Kelangsungan usaha

- Tingkat pengembangan usaha yang dilakukan oleh Sri Rejeki walaupun sudah dilakukan namun perencanaannya belum baik/optimal dan masih sederhana sekali sehingga membutuhkan pelatihan yang cukup dari pemerintah tentang masalah pengembangan usaha bordir ini.
- Tingkat keseriusan untuk memperbaiki posisi tawar sudah cukup bagus yang dilakukan Sri Rejeki, hanya sedikit nampak pada para pengrajin yang sudah mapan/besar. Untuk pengrajin kecil masih terkesan seadanya saja.

- Tingkat keseriusan untuk regenerasi disebagian besar pengrajin cukup baik. Usaha bordir adalah usaha keluarga sehingga bersifat turun-temurun. Anak dari sang pengusaha biasanya sudah sanggup untuk meneruskan usaha orang

(4). Peran pemerintah

- Tingkat kebutuhan dampingan dari pemerintah masih dibutuhkan oleh para pengrajin. mereka membutuhkan informasi tentang pemasaran bordir, teknologi baaru yang berkaitan dengan bordir.

- Tanpa dampingan pemerintah sebenarnya mereka sudah cukup mampu untuk menjalankan usaha mereka walaupun belum optimal.

- Tingkat ketergantungan pengrajin tidak terlalu tinggi karena selama ini perhatian pemerintah juga sangat kecil sehingga pengrajin harus berusaha sendiri atau bersama kelompok untuk tetap bertahan.

HARAPAN:

- Adanya pinjaman modal usaha yang bunga rendah.
- Penambahan bantuan bergulir lewat kelompok berupa mesin JUKI.
- Dibangun galeri khusus untuk kerajinan bordir di Kota Kudus.
- Perlunya pendampingan kepada pengrajin secara intensif oleh pemerintah terutama bagi pengrajin yang masih merintis usaha.

5). Nama Informan : Bp. H. Basir

(1) Pelibatan dalam perumusan kebijakan pemerintah

Bapak Basir dalam menjalankan usaha bordir pernah sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pengembangan usahanya berupa 1 (satu) buah komputer yang

diterimanya secara cuma-cuma. Dalam pemberian bantuan ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan apalagi ikut merumuskan kebutuhan yang perlu dipenuhi, bapak Basir **tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan** untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usahanya, sehingga yang terjadi kemudian komputer tersebut tidak bisa banyak membantu. Ironinya, saat sekarang komputer tersebut tidak digunakan sama sekali, karena memang produksinya lagi menurun.

Dari pemantauan lapangan usaha bordir yang mendapat bantuan baik berupa modal ataupun pendampingan **jarang sekali dimintai masukan** yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha mereka. **Bantuan di samaratakan** dengan semua pengusaha, padahal kebutuhan untuk mengembangkan usaha berbeda-beda.

Harapan kedepan dalam hal perumusan kebijakan adalah **dijalinnya hubungan yang erat dengan komunikasi yang akrab ibarat bapak dengan anaknya**, sehingga kebutuhan pengusaha bordir dapat ditangkap secara baik dan benar yang diwujudkan dalam bentuk perumusan dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. ada usulan untuk membentuk dan menjaga hubungan yang akrab antara kedua belah pihak (pengusaha dan pemerintah/Disperindag), disperindag membuka saluran bebas pulsa untuk menampung keluhan dan kebutuhan pengusaha

(2) Pembelajaran dan Pemampuan Masyarakat Dalam Berbagai Aspek.

Secara umum usaha-usaha bordir di Kudus termasuk milik Bp. Basir mempunyai **kesulitan untuk memperoleh akses mendapatkan sumber modal** terutama dengan pemerintah (Disperindag). Bapak Basir tidak pernah berhubungan dengan disperindag untuk mengembangkan usahanya. modal biasanya diperoleh dari hasil keuntungan usaha yang disisihkan dan pinjaman berupa bahan baku dari penyuplai. Untuk

mendapatkan modal, pengusaha kurang mengetahui mekanisme mendapatkan pinjaman modal selain dari Bank

Sebenarnya usaha bordir ini tidak memerlukan peralatan yang berteknologi canggih, yang lebih dibutuhkan adalah tenaga terampil yang bisa membordir dengan tangan dan mesin JUKI. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas barang dan menjaga pasar agar tidak berpindah.

Harapan yang ingin diwujudkan adalah kemudahan memperoleh akses mendapatkan sumber modal, pegawai Disperindag diharapkan aktif memantau kegiatan usaha bordir kepada pengusaha-pengusaha yang belum dikenal dan masih kecil yang banyak sekali mendapat hambatan. Dengan kemudahan akses ini maka akan mempermudah juga dalam mendapatkan pelatihan pembelajaran teknologi baru dan informasi-informasi dan strategi untuk perluasan pasar.

(3) Kelangsungan Usaha.

Usaha bordir ini sudah lama di mulainya. Biasanya merupakan usaha turun temurun dalam satu keluarga dan merupakan mata pencaharian tunggal yang sangat penting menunjang kehidupan keluarga, seperti Bp. Basir ini usahanya sudah berumur lebih dari 30 tahun. Karena merupakan usaha tunggal maka diupayakan untuk terus dikembangkan, antara lain dengan cara menemukan design baru produk-produk bordir.

posisi tawar yang sedang diupayakan adalah dimaksudkan untuk memperoleh kemudahan akses mendapatkan sumber modal.

Harapan untuk kelangsungan usahanya adalah menjaga kualitas produk dengan cara memperoleh tenaga yang terampil dan pendampingan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk menjaga kualitas daya saing dengan produk-produk daerah/propinsi lain dan produk dari luar negeri yang datang ke Indonesia.

(4) Peran Pemerintah.

Usaha bordir ini masih tergolong home industri, sehingga dengan adanya pendampingan akan sangat dibutuhkan untuk keperluan pengembangan usaha. akan terasa berbeda antara usaha yang mendapat dampingan dengan usaha yang tidak ada pendampingnya, terutama dalam hal kemandirian. Bapak Basir termasuk usaha yang tidak memperoleh pendamping dan kondisi saat ini sedang mengalami kemunduran tetapi tidak ada yang menolongnya kecuali dirinya sendiri.

Harapan dari peran pemerintah adalah mengoptimalkan program pendampingan bagi usaha bordir secara merata, dengan optimalnya program ini akan banyak membantu kesulitan yang dialami pengusaha bordir baik yang sudah besar ataupun yang masih kecil, terutama dalam memperoleh modal usaha yang berbunga rendah dan perluasan pasar dengan memberikan informasi-informasi yang tidak dipunyai pengusaha.

6). Nama informan : Bpk Muhammad Ansori

Selama ini keterlibatan bpk Ansori dalam proses hubungan dengan pemerintah, dalam perumusan kegiatan pendampingan cukup besar karena memiliki hubungan yang erat dengan pegawai Dinas. Karena beliau sudah memiliki dan mengetuai koperasi yang menaungi sebanyak 20 pengusaha kecil. Koperasi cahaya abadi berfungsi sebagai wadah komunikasi pengusaha industri kecil bordir, disinilah Bp Anshori memberikan

pembinaan kepada sesama pengusaha kecil lainnya, disisi lain koperasi dapat membantu dalam hal permodalan dan pemecahan masalah-masalah diantara mereka.

Kendala yang dihadapi oleh pengusaha di pedurenan antara lain :

- (1) Tumbuhnya industri kecil bordir yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan telah mandiri beberapa keluarga setelah beberapa tahun bekerja di industri bordir orang lain, sehingga berdampak tarik-menarik dalam hal pencarian konsumen atau pasar.

- (2) Kecilnya jumlah bantuan dana bergulir yang diberikan pemerintah.
- (3) Peralatan bordir yang sudah menggunakan komputer, masih dirasa berat karena harga jual yang sangat mahal.

- (4) Tidak adanya bapak asuh atau akuntan/ LSM yang membantu pemecahan masalah-masalah pengusaha.

Usulan dan saran pemberdayaan dan pendampingan yang di usulkan :

- (1) Perlu adanya akuntan atau LSM atau Badan yang independen guna membantu pengusaha untuk memecahkan masalah seperti masalah pemasaran dan keuangan.

- (2) Pemberian bantuan pendampingan atau pemberdayaan dari pemerintah sebaiknya jangan hanya satu bentuk yang diberikan, melainkan dapat beberapa model bantuan sekaligus diberikan. Namun bpk ansori hanya sanggup diberikan bantuan dana dari pemerintah maksimal Rp. 50 juta.

- (3) Perlu adanya perluasan pasar agar ada tarik menarik pasar antar sesama rekan kerja sendiri. Sehingga perlu optimalisasi daerah luar jawa bahkan luar negeri.

- (4) Pembuatan show room atau pabrik. Namun kendala di permasalahan modal.

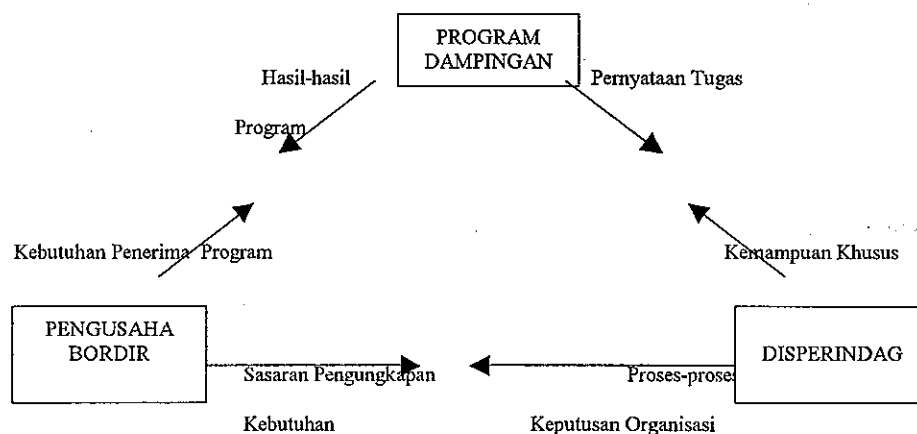
TABEL IV. 42
POLA DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAMPINGAN :

NO	VARIABEL	POLA	KEBUTUHAN DAMPINGAN
1	PEMASARAN :	<ol style="list-style-type: none"> 1. titip 2. pesanan 3. bila sepi setor ke pengecer 4. langsung pada pembeli yang datang <p>Jangkauan pasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lokal 2. regional / nasional (Kota-kota besar jawa dan luar jawa) 5. lewat perantara ke Luar Negeri (Brunei dan Malaysia) <p>Sumber desain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. desain sendiri 2. tiru desain yang ngetren 3. modifikasi contoh 4. pemesan <p>Media promosi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembeli 2. sesama pedagang 3. pameran <p>Merk dagang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bermerk 2. belum <p>Kemasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sudah punya 2. belum <p>Keindahan kemasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biasa 2. lumayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hak memperoleh informasi dampingan pasar (pameran) bagi semua perajin besar dan terutama yang kecil 2. Fasilitasi majalah desain bordir (masih mahal). 3. Diperlukan fasilitasi yang lebih terbuka kepada semua perajin (bukan hanya pada perajin / pengusaha tertentu saja) dalam informasi pasar dan pameran. <p>Usulan Pola Pendampingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam memberikan pendampingan harus secara transparan/terbuka terhadap yang kecil maupun yang sudah besar dalam mendapatkan kesempatan mengikuti promosi dalam maupun luar negeri. 2. Dapat dilaksanakan pameran dan temu usaha bagi industri kecil bordir dan konveksi antar Propinsi untuk membuka peluang pasar yang potensial dan diperoleh informasi pasar yang lebih luas. 3. Dibantu dalam pembuatan desain merk dagang yang semenarik mungkin.

2	Finansial	Modal awal : Meningkat Komposisi modal : 50 % modal pinjaman	1. Diperlukan pinjaman modal usaha yang tidak memberatkan dan dengan bunga yang rendah, mungkin sampai 0 %. (fleksibel)	1. Diperlukan pelatihan desain, informasi desain, manajemen & magang pada industri besar. 2. Diperlukan pelatihan pening- katan ketrampilan produksi, kemasan dan peningkatan mutu.	3	Sumberdaya Manusia	Tingkat ketrampilan bagus, lemah pada inovasi desain	1. Diperlukan pelatihan desain, informasi desain, manajemen & magang pada industri besar. 2. Diperlukan pelatihan pening- katan ketrampilan produksi, kemasan dan peningkatan mutu.	4	Bahan Baku	Membeli dari sumber lokal (sudah mencukupi)	5	Teknologi	Ada 2 jenis teknologi produksi : 1. mesin manual 2. mesin bordir JUKI 1. Diperlukan penguasaan dan pemilikan mesin bordir dengan komputer. 2. Diperlukan peningkatan teknologi manajemen umum (produksi, kemasan, pemasaran dsb)
---	-----------	--	--	---	---	-----------------------	--	---	---	------------	---	---	-----------	---

C. DISKUSI

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) merupakan sumber dan inspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyai asumsi bahwa "*pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat*".



Gb. IV.1. Kelayakan Program Pendampingan

David C. Korten (1984) mengemukakan teori pelembagaan program dengan menganalisis keberhasilan suatu program dari tiap elemen untuk meningkatkan adaptabilitas dan akseptabilitas program. Daya kerja suatu program dikemukakannya sebagai fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu

dengan kemanfaatan yang dirasakan (beneficiaries), program itu sendiri dan organisasi yang melaksanakan program.

Menurut Korten (1984) tersebut, program pembangunan akan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila tidak ada hubungan erat / sinergis antara :

- kebutuhan pihak penerima program dengan hasil-hasil program
- persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima bantuan dengan proses pengambilan keputusan oleh organisasi pelaksana.

Jadi untuk keberhasilan suatu program pengembangan industri kecil diperlukan *pertama* adanya kesesuaian antara kebutuhan pengusaha dan pengrajin dengan hasil pelaksanaan program, *kedua*, adanya kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan khusus organisasi dan petugas pelaksana, atau sejauhmana kemampuan organisasi pelaksana dengan program mengelola atau memenej program bantuan / dampilangnya, dan *ketiga*, kesesuaian antara sasaran pengungkapan kebutuhan penerima dengan proses pengambilan keputusan pada organisasi pelaksana.

Dengan mendasarkan pada pendapat di atas, pemberdayaan masyarakat bordir hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. kesesuaian antara kebutuhan perajin dengan program dampilangan instansi pemerintah (banyak kebutuhan praktis yang tidak bisa difasilitasi karena keterbatasan sifat program dampilangan yang sering terbatas konsep proyekta, bukan dampilangan berkelanjutan).

2. kesesuaian antara organisasi pendamping dengan cakupan tugas pendampingan. Diperlukan kecermatan didalam analisis tupoksi dan kelengkapan perangkat organisasi dinas pendamping (Kantor Perindagkop) dengan kebutuhan dampingan yang lebih intensif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor pengembangan industri kecil bordir :

a. Pemasaran

Pada umumnya para pengrajin/pengusaha menggunakan pola pemasaran dengan menipiskan barang, kemudian melalui pesanan. Sedangkan bila sedang sepi mereka menyebarkan hasil produksinya ke pengecer atau langsung kepada pembeli yang datang. Hasil produk bordir lebih banyak dijual di pasaran lokal dan nasional/regional, namun ada juga yang mampu mencapai ke pasaran internasional melalui perantara. Desain produk industri bordir pada umumnya diperoleh pengusaha melalui desain sendiri, menurut desain yang sedang ngetrend dan modifikasi contoh dari pemesan.

b. Finansial

Pada umumnya modal awal meningkat untuk pengembangan usaha. Sementara itu modal yang diputar sebesar 50 % umumnya bukan modal sendiri. Hal ini berarti masih dipelুকannya bantuan modal dari pihak lain. Namun demikian sistem per Kreditan yang ada sampai saat ini belum dapat mereka akses karena berbagai hambatan.

c. Sumber Daya Manusia.

Pada umumnya untuk tenaga terampil bordir cukup memadai namun masih ada kelemahan pada rendahnya inovasinya desain.

d. Bahan Baku

Pada umumnya bahan baku diperoleh dari supplier lokal. Secara umum tidak ditemukan hambatan didalam pengadaan bahan baku.

e. Teknologi

Pada umumnya para pengusaha/pengrajin industri kecil bordir menggunakan 2 (dua) jenis teknologi produksi, yaitu mesin manual dan mesin bordir JUKI.

Namun para pengusaha masih memerlukan penambahan mesin bordir dengan teknologi komputer untuk memenuhi permintaan pasar.

2. Diperlukan model pendampingan yang mempertimbangkan 3 (tiga) faktor kelayakan program (organisasi pendamping, penerima bantuan dan isi program), Dengan demikian identifikasi kebutuhan yang diungkapkan oleh para pengrajin hendaknya menjadi pertimbangan agenda program pendampingan-bagi instansi pembina.

B. Saran

1. Usulan/rekomendasi pola pendampingan industri kecil bordir :
 - Dalam memberikan pendampingan harus secara transparan/terbuka terhadap yang kecil maupun yang sudah besar dalam mendapatkan kesempatan mengikuti promosi dalam maupun luar negeri.
 - Dapat dilaksanakan pameran dan temu usaha bagi industri kecil bordir dan konveksi antar propinsi untuk membuka peluang pasar yang potensial dan diperoleh informasi pasar yang lebih luas.

- Diperlukan pinjaman modal usaha yang tidak membebarkan dan dengan sistem per kreditan yang fleksibel dan cocok bagi para pengrajin serta dengan bunga yang rendah.

- Sangat itu diperlukan adanya pelatihan peningkatan ketrampilan inovasi desain, peningkatan ketrampilan produksi dan peningkatan mutu.
- Masih diperlukan adanya bantuan mesin peralatan bordir yang modern serta dengan teknologi komputer terhadap pengusaha IK bordir secara kelompok maupun perorangan.

2. Model pendampingan hendaknya mempertimbangkan kesesuaian antara 3 (tiga) komponen kelayakan program, yakni :

- a. kesesuaian antara kebutuhan perajin dengan program dampingan instansi pemerintah (banyak kebutuhan praktis yang tidak bisa difasilitasi karena keterbatasan sifat program dampingan yang sering secara parsial dan bukan dampingan berkelanjutan).

- b. kesesuaian antara organisasi pendamping dengan cakupan tugas pendampingan. Diperlukan kecermatan didalam analisis kegiatan dan kelengkapan perangkat organisasi dinas pendamping (Kantor Perindagkop) dengan kebutuhan dampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann John, 1992, *Empowerment : The Politics and Alternative Development*, Blactewell Publishers, Cambridge, Massachusetts, 02142, USA.
- Ginanjari Kartasmita, 1996, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- David C. Korten, 1993, *Menuju Abad 21 : Tindakan Suka Rela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (diterjemahkan oleh Lilian Teja Sudhana).
- Kuncoro Mudrajat, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- David C. Korten, (1984), *People Centered Development, Contributions toward Theory and Planning Frameworks*, Kumarian Press, Connecticut
- Mas'ood Mochtar, 1994, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kuantitatif*, UI Press, Jakarta, (diterjemahkan oleh ; Cecep Rohendi Rohidi).
- Moleong Lexy. J, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roesdakarya, Bandung.
- Mubyarto, 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Moeljarto, Tjokrowinoto 1993, *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Moeljarto, Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S, (ed), 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS Jakarta.
- Salim Emil, 1992, *Pembangunan Berkelanjutan : Keperluan Penerapannya di Indonesia, Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia , Mencari Format Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan SPES, Jakarta.
- Schumacher, 1973, *Small is Beautiful*, Blond and Bridges, Londong, England.

Sedarmayanti, 2000, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Siagian P Sondang, 1991, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

Soetrisno Loekman, 1995, *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Anggito Abimanyu, dkk), PAU-SE UGM bersama BPFE UGM, Yogyakarta.

Sumodiningrat G, 1998, *Memangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, Yogyakarta.

Supriatna Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Swasono Sri Edi, 1998, *Pendekatan Pemberantasan Kemiskinan*, Makalah pada Seminar Nasional HMJP Ekonomi IKIP Malang, 25 Oktober 1998.

Syamsi Ibnu, 1986, *Pengantar Studi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Wiratno, Tatang dan Antonius Tarigan, 2002, *Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, NO. 28, Juli – September 2002, Bappenas, Jakarta, 2002

Lemlit Undip 2000, *Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil (RIPPIK) Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah*.